

**ANALISIS PENGARUH PAD, DAU DAN DAK TERHADAP ALOKASI
BELANJA MODAL DENGAN PDRB SEBAGAI VARIABEL MODERASI
PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2010-2018**

SKRIPSI

Oleh :

RUDI INDRA PRATAMA

NIM. (51151069)

Program Studi

EKONOMI ISLAM



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

2019

**ANALISIS PENGARUH PAD, DAU DAN DAK TERHADAP ALOKASI
BELANJA MODAL DENGAN PDRB SEBAGAI VARIABEL MODERASI
PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2010-2018**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh :

RUDI INDRA PRATAMA

NIM. (51151069)

Program Studi

EKONOMI ISLAM



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

2019

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PENGARUH PAD, DAU DAN DAK TERHADAP ALOKASI
BELANJA MODAL DENGAN PDRB SEBAGAI VARIABEL MODERASI
PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2010-2018**

Oleh :

RUDI INDRA PRATAMA

NIM. 51151069

Dapat disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Ekonomi Islam

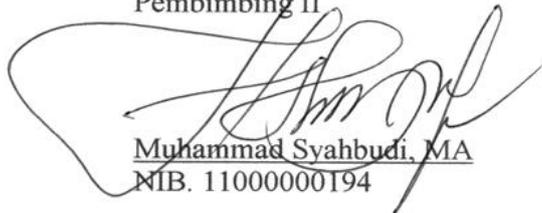
Medan, 8 November 2019

Pembimbing I



Dr. M. Ridwan, MA
NIP.197608202003121004

Pembimbing II



Muhammad Syahbudi, MA
NIB. 11000000194

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Islam



Dr. Marliyah, M.Ag
NIP.19760126 2003122003

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “PENGARUH PAD, DAU DAN DAK TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DENGAN PDRB SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2010-2018” an. Rudi Indra Pratama, NIM 51151069 Program Studi Ekonomi Islam telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tanggal 11 Desember 2019. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Islam.

Medan, 26 Februari 2020
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Ekonomi Islam UIN-SU

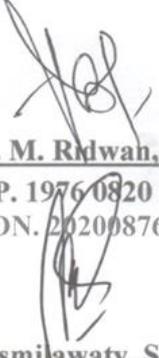
Ketua,

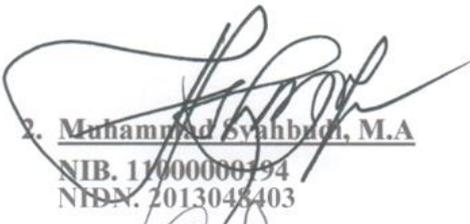
Sekretaris,


Dr. Marliyah, M.Ag
NIP. 1976 0126 200312 2 003
NIDN. 2026017602


Muhammad Lathief Ilhamy Nst, M.E.I
NIP. 1989 0426 201903 1 007
NIDN. 2026048901

Dosen Penguji


1. Dr. M. Ridwan, M.A
NIP. 1976 0820 200312 1 004
NIDN. 2020087604


2. Muhammad Syahbadi, M.A
NIB. 11000000194
NIDN. 2013048403


3. Kusmiawaty, SE, Ak, M.Ak
NIP. 1980 06142 01503 2 001
NIDN. 2014068001


4. Dr. Ahmad Amin Dalimunte, S.S.,
M. Hum
NIP. 198407122011011004
NIDN. 2012078402

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara




Andri Soemitra, MA
NIP. 197605072006041002
NIDN. 2007057602

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rudi Indra Pratama
NIM : 51.15.1.069
Jur/Program Studi : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Analisis Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan PDRB Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2018

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Medan, Oktober 2019

Saya yang Bermohon

Materai

Rudi Indra Pratama

Nim: 51.15.1.069

ABSTRAK

Rudi Indra Pratama (2019), Analisis Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Alokasi Belanja Modal dengan PDRB sebagai Variabel Moderasi pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2018. Dengan Pembimbing Skripsi I Dr. M. Ridwan, M.A dan Pembimbing II Muhammad Syahbudi, M.A

Belanja modal dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan produk domestik regional bruto. Beberapa permasalahan dalam penelitian ini adalah realisasi untuk pendapatan asli daerah selama 9 tahun, kemudian adanya kenaikan pada pendapatan asli daerah sedangkan belanja modal naik turun, adanya dana alokasi khusus yang tidak diterima sehingga bisa mempengaruhi belanja modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan PDRB sebagai pemoderasi terhadap belanja modal. Metode penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yang bersumber dari dokumentasi yang diambil dari Badan Pusat Statistik Sumatera Utara dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2010-2018. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah regresi asumsi klasik. Hasil penelitian ini menunjukkan pada uji simultan (Uji F) bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan PDRB sebagai pemoderasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan berdasarkan uji parsial (Uji t). pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal selanjutnya dana alokasi umum tidak berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal, kemudian dana alokasi khusus berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal, kemudian pendapatan asli daerah yang dimoderasi PDRB berpengaruh positif dan signifikan serta memperkuat terhadap belanja modal, dana alokasi umum yang dimoderasi PDRB tidak berpengaruh dan signifikan namun memperkuat terhadap belanja modal, kemudian dana alokasi khusus yang dimoderasi PDRB berpengaruh dan signifikan serta memperkuat terhadap belanja modal.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal, dan Produk Domestik Regional Bruto.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala limpahan anugerah dan rahmat yang diberikan-Nya sehingga penelitian skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Tidak lupa shalawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang merupakan tauladan dalam kehidupan manusia menuju jalan yang diridhai Allah SWT, Skripsi ini berjudul "ANALISIS PENGARUH PAD, DAU DAN DAK TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DENGAN PDRB SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2010-2018" diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk ini penulis mengucapkan terima kasih kepada.

1. Terspesial kepada Ayahanda Daryadi dan yang tercinta Ibunda Suryani Sinaga serta keluarga Penulis mengucapkan terima kasih atas pengorbanan dalam mendidik dan membesarkan, memberikan doa, cinta, kasih sayang, nasihat dan semangat serta dukungan yang tak bisa ternilai harganya demi kelancaran dan keberhasilan penulis dalam berbagai hal, terkhusus untuk penyelesaian skripsi ini. Dan tak lupa pula Abang penulis yaitu Ari Darma Syahputra yang selalu menghibur dan mensupport penulis Semoga perlindungan kasih sayang Allah menyertai mereka.
2. Kepada Pak Muslim beserta keluarga, Lek Ibas beserta keluarga, Acik Inung beserta keluarga, Ibu Antu beserta keluarga dan Acik Sisu yang telah banyak membantu penulis dengan baik selama menempuh pendidikan Sarjana di Medan. Beserta seluruh keluarga yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah bersedia mendoakan penulis.
3. Kepada Bapak Dr. M. Ridwan. MA selaku Pembimbing Skripsi I dan Bapak Muhammad Syahbudi, MA selaku Pembimbing Skripsi II ditengah tengah kesibukannya telah meluangkan waktunya.

4. Kepada Prof. Dr H. Saidurrahman MA selaku rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Kepada Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Ibu Marliyah, M.Ag selaku Ketua Jurusan dan Bapak Imsar, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam.
7. Kepada Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Serta seluruh civitas akademik atas bimbingan, bantuan, dan layanan yang diberikan.
8. Sahabat seperjuangan EKI F 2015 yang selalu bersama dan mendoakan penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat tersayang Bang Fadlan, Bang Ridwan, Iwan, Poso, Fauzan, Indra, semua anggota REMMI dan Semua Anggota Futsal Al- Qolamy yang selalu mendoakan penulis untuk menyelesaikan skripsi.
10. Teman-teman KKN 42 dan teman-teman seperjuangan jurusan Ekonomi Islam Angkatan 2015.
11. Dan semua pihak-pihak yang tidak dapat penulis tuliskan namanya satu-persatu yang telah berkenan membantu untuk menyelesaikan Skripsi ini. Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini. Namun penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam memperkaya ruang lingkup ilmu pengetahuan.

Medan, Juli 2019

Penulis

Rudi Indra Pratama
NIM.51151069

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
ABTRAK.....	iv
KATA PRNGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Batasan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori.....	10
1. Produk Domestik Regional Bruto.....	10

2. Pendapatan Asli Daerah.....	13
3. Dana Alokasi Umum.....	17
4. Dana Aloksi Khusus	20
5. Belanja Modal.....	21
B. Belanja Modal dalam Perspektif Islam	24
C. Penelitian Terdahulu	27
D. Kerangka Berpikir	35
E. Hipotesa Penelitian.....	36

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian.....	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
C. Populasi dan Sampel	39
D. Definisi Operasional Variabel.....	39
E. Teknik Pengumpul Data	42
F. Teknik Analisis Data	42

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Hasil Penelitian Sampel.....	47
B. Statistik Deskriptif	48
C. Analisis Data.....	50
1. Uji Asumsi Klasik	50
a. Uji Normalitas.....	50
b. Uji Multikolinieritas	51
c. Uji Autokorelasi	52
2. Pengujian Hipotesa.....	52

a. Moderated Regression Analisis (MRA).....	52
b. Uji Determinasi (R ²).....	53
c. Uji Simultan (Uji F)	54
d. Uji Parsial (Uji t).....	54
3. Pembahasan	57

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	64
C. Implikasi	65

DAFTAR PUSTAKA.....	66
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	
----------------------	--

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	: PDRB Provinsi Sumatera Utara 2010-2018.....	1
Tabel 1.2.	: Realisasi APBD PAD, DAU, DAK & Belanja Modal	4
Tabel 2.1.	: Penelitian Terdahulu	22
Tabel 4.1.	: Statistik Deskriptif	42
Tabel 4.2.	: Uji Normalitas	44
Tabel 4.3.	: Uji Multikolinieritas	45
Tabel 4.4.	: Uji Autokorelasi	46
Tabel 4.5.	: Uji Determinasi (R^2).....	47
Tabel 4.6.	: Uji Simultan (F).....	48
Tabel 4.7.	: Uji Parsial (t)	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	: Perkembangan PDRB Prov. Sumatera Utara 2010-2018...	2
Gambar 1.2.	: Perkembangan PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal	4
Gambar 2.1.	: Kerangka Berpikir	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

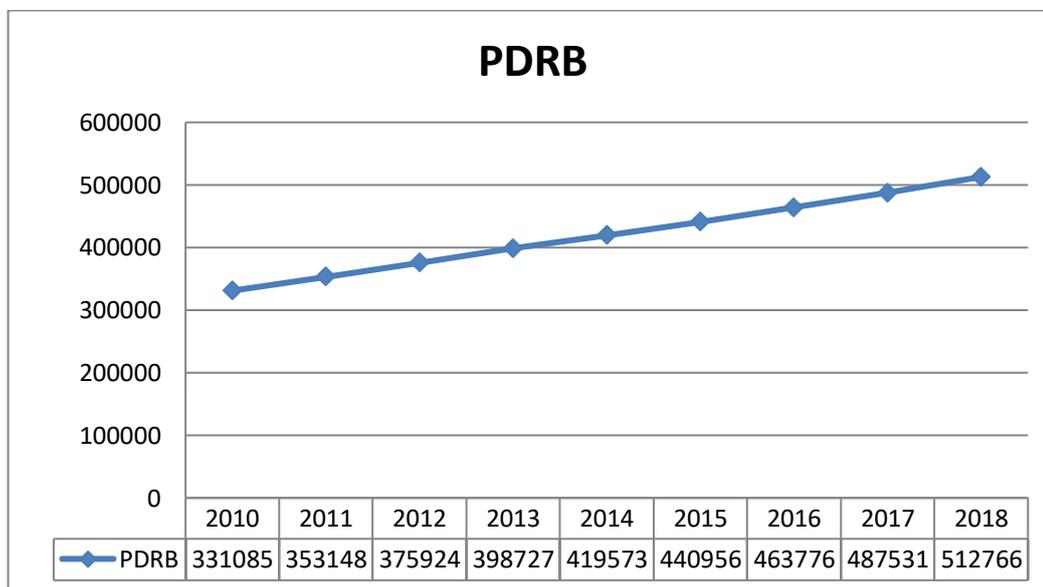
Pembangunan ekonomi ialah usaha usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang sering kali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan real perkapita. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tingkat output pada suatu saat tertentu ditentukan oleh sumber daya alam, sumber daya manusia, tingkat teknologi dan keadaan pasar.¹ Setiap pembangunan daerah adalah sebagai bagian dari pembangunan nasional dimana pada hakekatnya ialah upaya untuk meningkatkan kapasitas serta potensi pada pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan prima dan optimal kepada masyarakat. Pembangunan bukanlah semata fenomena ekonomi, pembangunan harus dipahami sebagai salah satu proses yang berdimensi jarak yaitu melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, seluruh rakyat dan kelembagaan nasional serta percepatan pembangunan ekonomi, pengangguran ketidakmerataan, kemiskinan absolute². Otonomi yang diberikan kepada daerah dengan memberikan wewenang yang luas, nyata, dan bertanggung jawab secara proporsional. Berlimpahnya tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap yang meliputi infrastruktur, peralatan, sarana dan prasarana sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian. Oleh karena itu, adanya otonomi daerah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan strategis yang bisa mempengaruhi pada kemajuan daerahnya.

¹ Irawan, M. Supermoko. *Ekonomika Pembangunan*, (Yogyakarta: BPFE,1997) h 5

² Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith. *Economics Development*. Terj. *Pembangunan Ekonomi*. Jilid I. (Jakarta: Erlangga, 2006). h.7

Tabel 1.1.
Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Sumatera Utara Atas Dasar
Harga Konstan Tahun 2010-2018 (Miliar Rupiah)

TAHUN	PDRB
2010	331,085.24
2011	353,147.59
2012	375,924.14
2013	398,727.14
2014	419,573.31
2015	440,955.85
2016	463,775.46
2017	487,531.23
2018	512,765.63



Gambar 1.1
Perkembangan Produk Domestik Regional Brotu di Sumatera Utara
2010-2018

Pada tabel diatas menunjukkan Produk Domestik Regional Bruto di Sumatera Utara dari tahun 2010 -2018 semakin meningkat. Dimana Sumatera Utara yang memiliki 25 Kabupaten dan 8 Kota. Hal ini terjadi karena perekonomian di provinsi Sumatera Utara didukung oleh pembangunan infrastruktur yang dimana menggerakkan sektor-sektor yang berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi. Adanya perbaikan infrastruktur tersebut di dukung oleh pemerintah daerah yang ada untuk menstimulasi agar barang, jasa, pendapatan masyarakat, pendidikan, kualitas sumber daya manusia di provinsi Sumatera Utara bergerak dengan cepat dan tidak tertinggal oleh daerah yang berdekatan sehingga meningkatkan produk domestik regional bruto di Provinsi Sumatera Utara

Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang telah merasakan dampak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah.³ Sistem otonomi daerah ini menyebabkan pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan mengurangi campur tangan pemerintah pusat. Kebijakan ini didukung dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 (kemudian menjadi Undang-Undang No.32 Tahun 2004) tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 (kemudian menjadi Undang-Undang No.33 Tahun 2004) tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perencanaan pembangunan wilayah ditujukan untuk mengupayakan keserasian dan keseimbangan pembangunan antar daerah sesuai dengan potensi alamnya dan memanfaatkan potensi tersebut secara efisien, tertib dan aman.

Pengukuran akan kemajuan sebuah perekonomian memerlukan alat ukur yang tepat, berupa alat pengukur pertumbuhan ekonomi antara lain yaitu Produk Domestik Bruto (PDB) atau di tingkat regional disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu jumlah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar.

³ Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus, Dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 2014

Pertumbuhan ekonomi mempunyai kaitan erat dengan perubahan struktural dan sektoral yang tinggi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembelanjaan daerah. Jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian PAD dapat diartikan yakni dana yang di himpun dari beberapa dinas terkait di daerah tersebut dan dapat bersumberkan dari pajak daerah maupun BUMD. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang didapat daerah dari pemungutan atas dasar tata tertib daerah yang berdasarkan pada susunan perundang-undangan⁴. Adapun besarnya PAD menunjukkan bahwa kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan memelihara serta mendukung hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang.⁵

Desentralisasi juga membawa perubahan pemikiran mengenai perimbangan keuangan daerah dan pusat, dengan mengubah prosedur penyaluran dana antara sentral dengan regional. Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah seperti pajak, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah, dan lain-lain.

Dengan demikian pendapatan asli daerah juga harus di perkuat dengan distribusi dari pemungutan pajak baik dari pajak kendaraan sampai pajak bumi dan bangunan. Selain itu pendapatan asli daerah dapat di perkuat pula dengan pendapatan yang sah.

Pemerintah Pusat mengeluarkan dana perimbangan berupa dana alokasi umum untuk mengatasi ketimpangan infrastruktur yang ada pada setiap daerah agar terciptanya pertumbuhan ekonomi yang merata. DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang

⁴ Tambunan, T. *Upaya-upaya Meningkatkan Daya Saing Daerah*. [www. Kardinindonesia .or.id](http://www.Kardinindonesia.or.id). Di akses 10/9/2019

⁵ Mamesah, D. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 1995). h. 34

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi⁶.

DAU merupakan sumber pendanaan yang penting bagi pemerintah daerah, DAU dapat didistribusikan untuk mengatasi masalah ketimpangan pendapatan antar daerah baik horizontal maupun vertikal. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.⁷

Tabel 1.2.

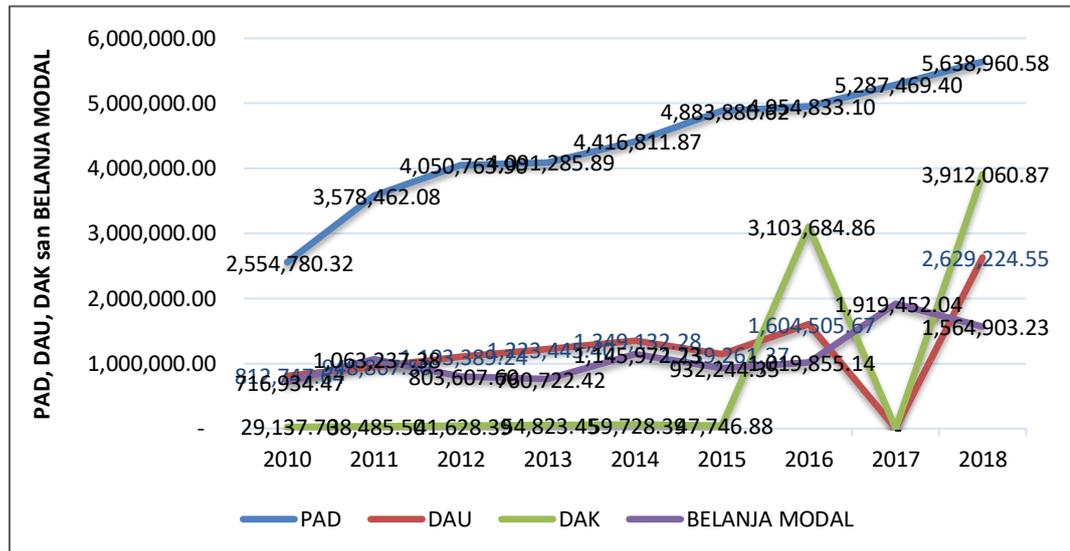
Data Realisasi APBD Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2018 (JutaRupiah)

TAHUN	PENDAPATAN ASLI DAERAH	DANA ALOKASI UMUM	DANA ALOKASI KHUSUS	BELANJA MODAL
2010	2,554,780.32	812,747.64	29,137.70	716,934.47
2011	3,578,462.08	948,867.50	38,485.50	1,063,237.38
2012	4,050,763.90	1,103,389.2	41,628.39	803,607.60
2013	4,091,285.89	1,223,445.4	54,823.45	760,722.42
2014	4,416,811.87	1,349,132.2	59,728.39	1,145,972.23
2015	4,883,880.62	1,139,261.3	47,746.88	932,244.35
2016	4,954,833.10	1,604,505.6	3,103,684.8	1,019,855.14
2017	5,287,469.40	-	-	1,919,452.04
2018	5,638,960.58	2,629,224.5	3,912,060.8	1,564,903.23

⁶ Undang-Undang No.33 Tahun 2004. tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

⁷*Ibid.*

Sumber: BPS dan DJPK yang diolah⁸



Gambar 1.2.
Perkembangan Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus di Sumatera Utara 2010-2018

Oleh karena itu, peneliti akan mengambil Variabel dependen Belanja Modal dengan Produk Domestik Regional Bruto sebagai moderasi dan untuk variabel independen menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Adapun judul yang akan diambil dan digunakan dalam penelitian ini yaitu "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dengan Produk Domestik Regional Bruto sebagai Variabel Moderasi pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara (2010-2018)".

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah

1. Secara realisasi pada DJPK Dana Alokasi Umum mengalami penurunan di tahun 2015 dan 2017

⁸ <https://www.bps.go.id/> di akses pada 20/5/2019

2. Secara realisasi pada DJPK Dana Alokasi Khusus mengalami penurunan di tahun 2015 dan 2017
3. Secara realisasi pada DJPK Belanja Modal mengalami penurunan tahun 2012, 2013, 2015, dan 2018
4. Pada PDRB mengalami peningkatan namun beberapa tahun pada PAD, DAU, DAK, maupun Belanja Modal mengalami penurunan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis merumuskan permasalahan sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu :

1. Apakah ada Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah ada Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah ada Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara?
4. Apakah PDRB sebagai variabel moderasi dapat memperkuat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara?
5. Apakah PDRB sebagai variabel moderasi dapat memperkuat pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara?
6. Apakah PDRB sebagai variabel moderasi dapat memperkuat pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara?

D. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, masalah perlu diberi batasan agar dalam pembahasannya dapat lebih terarah. Maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya berfokus pada salah satu data realisasi DJPK mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal (BM) serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan.
2. Tahun penelitian yang diambil dari provinsi Sumatera Utara adalah tahun 2010-2018

E. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah terdapat tujuan yang dapat dicapai oleh peneliti yaitu :

1. Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.
2. Menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.
3. Menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.
4. Menganalisis PDRB sebagai variabel moderasi dapat memperkuat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal di Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara.
5. Menganalisis PDRB sebagai variabel moderasi dapat memperkuat pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.
6. Menganalisis PDRB sebagai variabel moderasi dapat memperkuat pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.

F. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian tentang determinan kemiskinan di Pulau Jawa diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membaca. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis, dapat mengetahui faktor - faktor apa yang mempengaruhi tingkat Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Selain itu penulis dapat menambah wawasan, pengetahuan dan mempraktekkan ilmu teori yang didapat selama perkuliahan berlangsung. Sekaligus sebagai kemampuan tolak ukur dalam menganalisis untuk memenuhi tugas akhir dalam mencapai gelar kesarjanaan di Jurusan Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bagi Pemerintah Daerah setempat, dapat menjadi hal pertimbangan dan intropeksi variabel yang digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Sehingga Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dapat meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto secara terus menerus.
3. Bagi masyarakat dan pihak lain, dapat digunakan sebagai acuan atau referensi dan menjadi gambaran umum faktor –faktor apa saja yang dapat mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Produk Domestik Regional Bruto

Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Perbedaan diantara keduanya adalah lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih condong bersifat kualitatif, yakni bukan hanya pada pertambahan, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, sosial dan teknik. Dalam pemerintah daerah, pembangunan sarana dan prasarana berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertumbuhan penduduk. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan dan perbaikan infrastruktur untuk pelayanan kepada publik dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ialah suatu penjumlahan dari semua pertambahan kegiatan ekonomi dalam periode tertentu kemudian PDRB terbagi menjadi dua jenis yakni menurut harga konstan dan tingkat tahun berlaku. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita diproduksi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita⁹. Satu-satunya ukuran yang paling penting dalam konsep ekonomi adalah produk domestik bruto (PDB) yang mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu negara atau nasional. PDRB untuk mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu daerah atau lokal.

Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti menggunakan PDRB sebagai alat ukur untuk menilai pertumbuhan ekonomi. Terdapat faktor-faktor yang

⁹ Boediono. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. (Yogyakarta: Penerbit BPFE, 1985).. h. 23

mempengaruhi pembangunan sarana dan prasarana, antara lain sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan, transportasi, komunikasi, komposisi sektor industri, teknologi, pasar ekspor, situasi perekonomian internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah dan dukungan pembangunan. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (economic growth).

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu¹⁰. PDRB merupakan salah satu dari neraca wilayah yang metode perhitungannya menggunakan tiga pendekatan. Adapun ketiga pendekatan tersebut yaitu metode produksi, metode pengeluaran, dan metode pendapatan¹¹. Secara teori, penghitungan PDRB dengan menggunakan ketiga metode tersebut akan menghasilkan nilai yang sama

a. Metode Pendekatan Produksi

Pada pendekatan produksi, PDRB merupakan penjumlahan Nilai Tambah Bruto (NTB) dari barang dan jasa yang ditimbulkan oleh unit-unit kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu pada satu periode waktu tertentu.

Menurut Arsyad (1999) fungsi produksi cobb-douglas tersebut dapat dituliskan dengan cara berikut:

$$Y = AL^{\alpha} K^{\beta}$$

Dimana

Y = total produksi, L = tenaga kerja, k = modal, A = produktivitas faktor total, α dan β adalah elastisitas output dari tenaga kerja dan modal, masing-masing.

Nilai-nilai konstan ditentukan oleh teknologi yang tersedia. 19 Dalam penghitungan PDRB, seluruh lapangan usaha dikelompokkan menjadi sembilan sektor ekonomi. Ini sesuai dengan pembagian yang digunakan dalam penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) ditingkat nasional. Pembagian ini

¹⁰<http://www.bi.go.id/> di akses pada 12/6/2019

¹¹<https://sumut.bps.go.id/> di akses pada 14/6/2019

sesuai dengan System of National Accounts (SNA). Hal ini juga memudahkan para analis untuk membandingkan PDRB antar provinsi dan antara PDRB dengan PDB.

b. Metode Pendekatan Pengeluaran

Pada pendekatan pengeluaran, PDRB merupakan penjumlahan dari komponen pengeluaran yang terdiri dari: konsumsi rumah tangga dan lembaga nirlaba, konsumsi pemerintah, pemebentukan modal tetap bruto/investasi, dan selisih ekspor impor.

c. Metode Pendekatan Pendapatan

Pada pendekatan pendapatan, PDRB merupakan penjumlahan dari balas jasa faktor-faktor produksi yaitu upah/gaji, surplus usaha, penyusutan/amortisasi, dan pajak tak langsung neto. Komponen ini disebut juga sebagai biaya input/primer¹².

Pada umumnya, PDRB disajikan dengan dua terminologi harga yang berbeda yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga konstan dihitung untuk mengetahui perubahan tingkat produksi riil dengan mengeluarkan pengaruh dari faktor perubahan harga antar periode waktu. Untuk itu, digunakan tahun dasar sebagai acuan. Di mana pertimbangan adanya tahun dasar adalah kondisi perekonomian yang relatif stabil. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku merupakan PDRB yang penghitungan output dan NTB-nya menggunakan harga pada waktu yang sama dengan waktu barang/ jasa diproduksi. Penyajian dengan cara ini akan memberikan gambaran dari struktur ekonomi wilayah pada tahun berjalan.

Pembangunan ekonomi adalah usaha usaha untuk meningkatkann taraf hidup suatu bangsa yang sering kali diukur dengan tinggi rendah nya real perkapita. Jadi tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk menikkan pendapatan rasional secara real juga untuk meningkatkan produktivitas.¹³ Setiap

¹²*Ibid.h.35*

¹³Michael P. Todaro. *Economnics for a Developing World*. Longman (1981), h. 96-97

pembangunan daerah adalah sebagai bagian dari pembangunan nasional dimana pada hakekatnya ialah upaya untuk meningkatkan kapasitas serta potensi pada pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan prima dan optimal kepada masyarakat. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa output pada suatu saat tertentu ditentukan oleh tersedianya atau digunakan baik sumber daya alam, sumber daya manusia, tingkat teknologi, keadaan pasar, dan kerangka kehidupan ekonomi (sistem perekonomian) serta sikap output itu sendiri. Sebenarnya masih ada faktor faktor lain yang dapat berpengaruh tinggi rendahnya pendapatan nasional. Faktor ini berhubungan satu sama lain namun tidak hanya terjadi sesaat tetapi juga untuk suatu jangka tertentu¹⁴.

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluan daerah. Oleh karena itu, tiap-tiap daerah harus mengupayakan agar dapat dipungut seintensif mungkin. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah adalah kemampuan keuangan daerah yang memadai. Semakin besar keuangan daerah, semakin besar pula kemampuan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah.¹⁵

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembelanjaan daerah. Jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian PAD dapat diartikan yakni dana

¹⁴*Ibid. h.5*

¹⁵A. Fauzi dan E. Iskandar. *Cara Membaca APBD*. (Malang: Brawijaya University Press). h.44

yang di himpun dari beberapa dinas terkait di daerah tersebut dan dapat bersumberkan dari pajak daerah maupun BUMD.

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang didapat daerah dari pemungutan atas dasar tata tertib daerah yang berdasarkan pada susunan perundang-undangan¹⁶. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dan sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu komponen yang sangat menentukan berhasil tidaknya kemandirian pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka otonomi daerah saat ini¹⁷. Salah satu komponen yang sangat diperhatikan dalam menentukan tingkat kemandirian daerah dalam rangka otonomi daerah adalah sektor Pendapatan Asli Daerah Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan dari pendapatan Daerah dan ditetapkan Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 pada bab V (lima) pasal 6 nomor ayat 1 (satu) tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pendapatan asli daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁸

a. Pajak daerah

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh perorangan atau suatu badan kepala daerah tanpa adanya imbalan langsung yang didapat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlakudan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah¹⁹. Menurut Pemerintah daerah, Pajak daerah dapat digolongkan ke dalam dua

¹⁶*Ibid*

¹⁷*Ibid.h.40*

¹⁸Pasal 1 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

¹⁹Ahmad, Y. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002). h. 67

kategori yaitu : Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.Sesuai dengan Undang-undang No 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah²⁰. Jenis-jenis pajak Provinsi terdiri dari :

- a. Pajak kendaraan Bermotor dan Kendaraan.
- b. Bea balik nama kendaraan dan kendaraan.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d.Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Menurut UU no 28 tahun 2009 pajak kabupaten/kota dibagi menjadi Pajak hotel, pajak Restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan²¹. Pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

- a. Sebagai sumber pendapatan daerah (budgetary)
- b. Sebagai alat pengatur (regulatory)

Adapun ciri-ciri pajak daerah yaitu :

- a) Pajak dipungut berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku
- b) Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah
- c) Pajak tidak menimbulkan adanya timbal balik dari pemerintah secara langsung
- d) Pajak dipungut untuk membiayai pengeluaran pemerintah
- e) Pajak berfungsi sebagai pengatur anggaran Negara

²⁰Undang-undang No 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.

²¹Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang regulasi Pajak Daerah dan retribusi Daerah.

b. Retribusi daerah

Menurut Undang – Undang tentang regulasi Pajak Daerah dan retribusi Daerah, melalui Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan UU Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000²². Berlakunya Undang - Undang pajak dan retribusi daerah disisi lain memberikan keuntungan daerah karena dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun dilainsisi beberapa sumber pendapatan asli daerah harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama yang berasal dari retribusi daerah. Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Ada pun ciri-ciri retribusi Daerah:

- a. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah
- b. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis
- c. Adanya timbal balik secara langsung dapat ditunjuk
- d. Retribusi dikenakan pada setiap orang atau pun badan yang menggunakan jasa-jasa yang disiapkan negara.

Ada pun 3 jenis Retribusi yang dipungut oleh daerah menurut UU Nomor 28 Tahun 2009²³ yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

- a. Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah yang tujuan untuk kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh perorangan atau badan.
- b. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perorangan atau badan.

²²Undang-undang No 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.

²³Undang – Undang tentang regulasi Pajak Daerah dan retribusi Daerah, melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

- c. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perorangan atau badan.

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan pemberian izin tertentu atau khusus yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.²⁴

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Merupakan keuntungan atau laba bersih suatu perusahaan daerah bagi perusahaan milik daerah yang terdiri dari kekayaan daerah, maupun modal yang sebagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan yang sah terdiri dari hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

Menurut Undang- Undang nomor 33 tahun 2004 menyatakan bahwa jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dirinci menurut pendapatan yang mencakup bagian dari laba atau keuntungan atas penyertaan modal pada perusahaan miik daerah atau badan usaha milik daerah, bagian laba atas penyertaan modal pada perusaahan milik negara ataubadan usaha milik daerah dan bagian laba atas penyertaan modal kepada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat. Hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan menurut bagian laba, devisien dan penjualan saham milik daerah.²⁵

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

Menurut Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah yang sah menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah yang sah²⁶ meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan

²⁴Siahaan. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013). h. 97-99

²⁵HAW, W. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007). h 74-75

²⁶Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah yang sah

- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

3. Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Daerah dan Pusat, dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi²⁷.

Menurut Bastian Dana Alokasi Umum adalah dana perimbangan dalam rangka untuk pemerataan kemampuan keuangan antar- daerah²⁸. Sedangkan menurut Halim Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi²⁹. Dari penjelasan di atas terlihat bahwa Dana Alokasi Umum memiliki jumlah yang sangat signifikan sehingga semua pemerintah daerah menjadikannya sebagai sumber penerimaan terpenting dalam anggaran penerimaannya dalam APBN. Oleh karena itu, Dana Alokasi Umum dapat dilihat sebagai respon pemerintah terhadap aspirasi daerah untuk mendapatkan sebahagian kontrol yang lebih besar terhadap keuangan negara. Tujuan Dana Alokasi Umum adalah untuk mengatasi ketimpangan fiskal keuangan antara pemerintah pusat dan ketimpangan horizontal antar pemerintah

²⁷Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Daerah dan Pusat.

²⁸Indra Bastian, *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: salemba empat, 2002). h.84

²⁹Halim, A. *Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 3 Akuntansi Sektor Publik*. (Jakarta: Salemba Empat. 2002). h. 160

daerah karena ketidakmerataan sumber daya yang ada pada masing-masing daerah.

Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Alokasi dana alokasi umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi Dana alokasi umum relatif besar. Dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai. DAU merupakan sumber pendanaan yang penting bagi pemerintah daerah, DAU dapat didistribusikan untuk mengatasi masalah ketimpangan pendapatan antar daerah baik horizontal maupun vertikal.

Ekonomi antara satu Provinsi dengan Provinsi lain tidak dapat dihindari dengan adanya desentralisasi fiskal. Disebabkan oleh minimnya sumber pajak dan sumber daya alam yang kurang dapat digali oleh Pemerintah Daerah. Untuk menanggulangi ketimpangan tersebut, Pemerintah pusat berinisiatif untuk memberikan subsidi berupa DAU kepada daerah. Bagi daerah yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi, akan diberikan DAU lebih besar dibanding daerah yang kaya dan begitu juga sebaliknya. Selain itu untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penugasan pajak antara pusat dan daerah telah diatasi dengan adanya kebijakan bagi hasil dan Dana Alokasi Umum minimal sebesar 26 % dari Penerimaan dalam negeri. Dana Alokasi Umum akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran³⁰ yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah. Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut:

³⁰Halim, A. *Akuntansi sector Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Pertama*. (Jakarta: Salemba Empat, 2009). h. 68

- a. DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26 % dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
- b. DAU untuk daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan masing masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan diatas.
- c. DAU untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- d. Porsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia³¹.

Dalam UU No.32 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah daerah, Pemerintah pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU)³², Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping Dana Perimbangan tersebut, Pemerintah daerah memiliki sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer dari Pemerintah pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Menurut UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah³³ (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan Fiscal Gap, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. Dana Alokasi Umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada.

³¹Bambang Suprayitno.(2015). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Anggaran Belanja Modal*

³²UU No. 32 tahun 2014

³³UU No.33 Tahun 2014

4. Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Daerah dan Pusat menyatakan bahwa dana alokasi khusus dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan khusus.

Dana Alokasi Khusus bertujuan untuk membantu membiayai kebutuhan khusus daerah. Dana alokasi khusus merupakan dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus³⁴ yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sementara pada pasal 1 angka 23 UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan antara keuangan pusat dan keuangan daerah dijelaskan bahwa dana alokasi khusus selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang ditujukan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mandanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Selanjutnya pada pasal 162 dijelaskan bahwa DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah tertentu dalam rangka pendanaan desentralisasi³⁵ untuk :

- a. Membiayai kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah Pusat atas dasar prioritas nasional.
- b. Membiayai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu. Dalam menjalankan kebijakan Dana Alokasi Khusus,

Maka terdapat langkah- langkah yang harus dilakukan pemerintah³⁶ yaitu:

- 1) Penetapan Program dan Kegiatan Secara lebih rinci penetapan program ini diatur dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 55 tahun 2005 yang menyatakan bahwa program dan kegiatan yang akan didanai dari DAK merupakan program yang menjadi prioritas nasional yang dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah. kegiatan

³⁴*Ibid.*

³⁶PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan.

dan program yang akan didanai tersebut merupakan program yang diusulkan oleh Kementrian Teknis yang melalui proses koordinasi dengan Menteri dalam negeri, Menteri keuangan, dan Menteri Negara perencanaan dan pembangunan nasional.

- 2) Penghitungan DAK Dalam PP Nomor 55 tahun 2005 pasal 54 dijelaskan bahwa perhitungan DAK³⁷ dilakukan melalui dua tahap yaitu:
 - a. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK. Dimana dalam tahap ini maka daerah yang akan menerima DAK harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis.
 - b. Penentuan besaran alokasi DAK untuk masing-masing daerah
- 3) Pengalokasian DAK, Setelah semua kriteria dan perhitungan selesai dilaksanakan maka tahap selanjutnya adalah pengalokasian DAK. Daerah yang menerima DAK berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana pada laporan pertanggung jawaban pemerintah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

5. Belanja Modal

Belanja modal adalah suatu pengeluaran yang dilakukan untuk menambah aset tetap atau investasi yang ada sehingga kan memberikan manfaatnya tersendiri pada periode tertentu. Belanja modal merupakan suatu pengeluaran pemerintah yang dimana dalam pelaksanaannya untuk pembentukan modal. pembentukan modal yang dimaksud dapat berupa tanah, peralatan, mesin, gedung dan bangunan, binatang dan lain sebagainya. Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap yang meliputi infrastruktur, peralatan, sarana dan prasarana sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian. Oleh karena itu, adanya otonomi daerah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan

³⁷Pasal 54 PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan.

ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan strategis yang dapat mempengaruhi pada kemajuan daerahnya. Belanja daerah yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung (permendagri nomor 25 tahun 2009), merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan otonomi daerah. Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap.

Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan. Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka menghadapi desentralisasi fiskal. Belanja modal memiliki peranan penting karena memiliki masa manfaat jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada publik. Alokasi belanja modal ini di dasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap Pemerintah Daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 71 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah³⁸, Belanja Modal merupakan bagian dari kelompok belanja Daerah, yang memiliki pengertian berupa pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar

³⁸Permendagri Nomor 71 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

(BAS) menyebutkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya³⁹ yang memberi manfaat lebih dari satu periode kuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja, bukan untuk dijual⁴⁰ Belanja Modal merupakan pengeluaran untuk memperoleh aset yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Yang termasuk belanja modal⁴¹;

- a. Belanja tanah, merupakan pengeluaran biaya yang digunakan untuk pengadaan pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sampai tanah tersebut siap digunakan.
- b. Belanja peralatan dan mesin, adalah biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor serta manfaatnya lebih dari satu tahun.
- c. Belanja modal gedung dan bangunan, pengeluaran biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian termasuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung tersebut dalam kondisi siap pakai.
- d. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, pengeluaran biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan/pembangunan/pembuatan serta perawatan, termasuk pengeluaran untuk

³⁹Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.91/PMK.06/2007

⁴⁰Mawarni, dkk. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Aceh). Jurnal Akuntansi Volume 2, No.2, 2013. h. 82

⁴¹Abdul Halim. (2008). Manajemen Keuangan Daerah (Bunga Rampai). (Yogyakarta. UPP AMP YKPN ,2001). h.71

perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan tersebut dalam kondisi siap pakai.

- e. Belanja aset tetap lainnya, pengeluaran biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahann/penggantian/peningkatan/pembangunan/pembuatan serta perawatan, terhadap fisik lainnya. Yang termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal untuk kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku serta jurnal ilmiah⁴²

B. Belanja Modal Dalam Perspektif Islam

Dalam syariat islam setiap individu, kelompok maupun wilayah pada prinsipnya harus memiliki modal sebagai persiapan yang baik yang akan menjadikan bermanfaat dan Modal tidak boleh diabaikan, namun wajib menggunakannya dengan baik agar ia terus produktif dan tidak habis digunakan.. Seperti yang terdapat pada hadist riwayat Bukhari.

عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا اِشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَاتِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى الثَّرَابَ فِيهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: “Dari ‘Urwah bahwa Nabi SAW memberinya satu dinar untuk dibelikan seekor kambing, dengan uang itu ia beli dua ekor kambing, kemudian salah satunya dijual seharga satu dinar, lalu dia menemui beliau dengan membawa seekor kambing dan uang satu dinar. Maka beliau mendoakan dia keberkahan

⁴²Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2013, h.11-12

dalam jual belinya itu, “sungguh dia apabila berdagang debu sekalipun, pasti mendapatkan untung”. (HR. Bukhari)⁴³

Terlihat pada hadist tersebut, bahwa Nabi menyukai umatnya yang mau berusaha agar mendapatkan keuntungan dari modal yang dimiliki. Dan bagi yang tidak mampu menjalankan usaha, Islam menyediakan bisnis alternatif yaitu mudharabah, musyarakah, dan lain-lain. Modal adalah sejumlah kekayaan yang bisa saja berupa assets ataupun intangible assets, yang bisa digunakan. Modal disini dapat berupa uang, diamna keuangan pada suatu negara adalah berupa hak dan kewajiban serta segala sesuatu berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Dari sisi objek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, mnetar, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut⁴⁴

Kebijakan ekonomi menurut ajaran Islam adalah keadilan distributif

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan

⁴³ H.R Bukhari...Muhammad Amin. *Tafsir Ayat Ekonomi*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset).2013. h.196

⁴⁴Isnaini, Yenni, dkk. *Hadis-hadis Ekonomi*. (Jakarta: Prenadamedia Grup. 2015). h.231

bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.(Al-Hasyr:7).⁴⁵

Dengan prinsip keadilan ini, Al-Qur'an menegaskan bahwa segelintir orang tidak dibolehkan menjadi terlalu kaya sementara pada saat yang sama kelompok lain semakin dimiskinkan. Kondisi ini bertentangan dengan hakikat kemanusiaan yang berazaskan tauhid. Ajaran tauhid berimplikasi pada jaminan persamaan dan persaudaraan antara sesama manusia dalam mengolah dan memetik hasil dari sumberdaya alam serta memanfaatkannya bagi kehidupanmasyarakat secara adil. Keadilan distributif ini pada konsep Islam tentang keamanan manusia pada Allah SWT dan sesamanya.⁴⁶

Dalam Al-Qur'an pembangunan ekonomi lazimnya dibangun dengan konsep (*imarah al-ard*) yaitu memakmurkan bumi. Seperti firman Allah yang terdapat di Q.S. Al-Hud: 61

وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن
إِلَٰهِ غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ
ثُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

Artinya: Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)". (Q.S. Al-Hud: 61).⁴⁷

Selain kata *imarah*, pembangunan ekonomi menurut pakar ekonomi juga terdapat dalam semua ayat yang menyebutkan kata-kata *kasb* (berusaha), *al-*

⁴⁵Al-Qur'an Terjemahan.Q.S. Al-Hasyr: 7

⁴⁶Azhari Akmal Tarigan. *Tafsir ayat-ayat ekonomi sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata Kunci Dalam Al-Qur'an..* (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2012) h.198-199

⁴⁷Al-Qur'an Terjemahan.Q.S. Al-Hud: 61

infaq(nafkah/biaya) atau *ad-darbu fil ard* yang kesemuanya merujuk pada aktivitas ekonomi baik itu mengola dan mengombinasikan input dan output⁴⁸.

C. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian penelitian sebelumnya dapat dijadikan perbandingan dan acuan untuk memberikan gambaran terhadap penelitian terdahulu yang mengambil tema analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan berguna bagi penulis dalam menyusun penelitian ini. Pada bagian ini akan diberikan beberapa penlitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian ini :

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti Dan Tahun	Judul	Hasil
1	Ni Wayan Ratna Dewi dan I Dewa Gede Dharma Suputra 2017 ⁴⁹	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi PDRB. • Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi PDRB. • Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi PDRB. • Belanja Modal tidak

⁴⁸*Ibid*, h.248

⁴⁹Ni Wayan Ratna Dewi dan I Dewa Gede Dharma Suputra. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.18.3. 2017. 1745-1773

			berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi PDRB.
2	Mawarni, dan Syukriy Abdullah 2013 ⁵⁰	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi PDRB (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Aceh)	<ul style="list-style-type: none"> • PAD berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi PDRB. • berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi PDRB. • belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi PDRB.
3	Siti Aisyah 2014 ⁵¹	Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Alokasi	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat pengaruh yang signifikandari PDRB terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal • Terdapat pengaruh positif pada Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi anggaran Belanja

⁵⁰Mawarni, dan Syukriy Abdullah. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pdrb (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Aceh) Dalam Jurnal Ekonomi Volume 2, Nomor 2. 2013. h.30-37

⁵¹Siti Aisyah. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah Tahun 2010-2012). Dalam skripsi Universitas Islam Sultan Agung. 2014.

		<p>Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah Tahun 2010-2012)</p>	<p>Modal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat pengaruh positif Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal Daerah • Terdapat pengaruh positif pendapatan asli daerah (PAD) terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal
4	Nurin Hidayati 2016 ⁵²	<p>Analisis Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal • DAU berpengaruh terhadap belanja modal dengan intensitas dan arah yang berlawanan • DAK memiliki pengaruh yang positif terhadap belanja modal • pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh dan tidak dapat memoderasi hubungan PAD pada alokasi belanja modal • bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh dan dapat memoderasi hubungan DAU

⁵²Nurin Hidayati. Analisis Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. Dalam skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta . 2016.

			<p>pada alokasi belanja moda</p> <ul style="list-style-type: none"> • pertumbuhan ekonomi berpengaruh dan dapat memoderasi hubungan DAK pada belanja modal dengan intensitas dan arah yang berlawanan
5	<p>Sri Cahyaning, <i>Puspita Sari</i> <i>Surya</i> <i>Prabawati dan</i> <i>Eva Wany</i> 2017⁵³</p>	<p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah, Dana berpengaruh secara parsial terhadap alokasi belanja modal • Alokasi Umum tidak berpengaruh secara parsial terhadap alokasi belanja modal • Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh secara parsial terhadap alokasi belanja modal • Dana Bagi Hasil berpengaruh dan mampu dimoderasi Pertumbuhan Ekonomi terhadap alokasi belanjamodal • Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh dan tidak

⁵³Sri Cahyaning, *Puspita Sari Surya Prabawati dan Eva Wany*. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015. Dalam *accounting journal unnes* 2017.

			<p>mampu dimoderasi Pertumbuhan Ekonomi terhadap alokasi belanja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil secara bersama-sama berpengaruh terhadap alokasi belanja modal dimoderasi dengan pertumbuhan ekonomi
--	--	--	--

1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Dari penelitian terdahulu yang penulis cantumkan, adanya kesamaan variabel. Seperti pada variabel terikat yakni Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Kemudian pada variabel bebas seperti Belanja Modal serta variabel moderasi yang dimana sebagai penguat atau pelemah dari variabel-variabel tersebut.

Namun yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah objek dan lokasi yakni pada pemerintah daerah Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

2. Pengaruh Antar Variabel

a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. Pendapatan Asli Daerah didapatkan melalui hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Untuk itu, dalam masa desentralisasi seperti ini, pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya masing-masing dengan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki supaya bisa

membiyai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana dan prasarana daerah melalui alokasi belanja modal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Dedi secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap belanja modal⁵⁴. Menurut Mardiasmo pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah⁵⁵. Dimana PAD merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi – potensi daerah dan meningkatkan jumlah barang atau jasa.

b. Pengaruh Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal

Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan desentralisasi dilakukan dengan pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya. Wujud desentralisasi yaitu pemberina dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah⁵⁶. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

⁵⁴Dedi Suprianto .2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Pemerintah di Kabupaten Nagan Raya. h. 42

⁵⁵Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. (Yogyakarta: ANDI. 2002). h.36

⁵⁶UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Menurut Prakosa ialah bukti empiris bahwa jumlah belanja modal dipengaruhi oleh dana DAU yang diterima dari pemerintah pusat.⁵⁷ Menurut Halim DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.⁵⁸ Estimasi untuk perhitungan anggaran DAU dihitung berdasarkan UU No. 25 Tahun 1999 dan PP No. 104 Tahun 2000⁵⁹. Jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh pada Produk Domestik Regional Bruto, maka terdapat kemungkinan kuat bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) juga berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah karena nilai DAU pada umumnya lebih besar dibandingkan kontribusi PAD.

c. Pengaruh Dana Alokasi Khusus dengan Belanja Modal

Dana perimbangan merupakan perwujudan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Salah satu dana perimbangan adalah Dana Alokasi Khusus, DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang.

Dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal. Selain itu ada yang berpendapat bahwa Dana Alokasi Khusus merupakan salah satu sumber pendanaan untuk belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara pemberian dana transfer

⁵⁷Prakosa, Kesit Bambang. (2004). *Analisa Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Provinsi Jawa Tengah dan DIY. JAAI Vol. 8 No. 2*, h. 114

⁵⁸Halim, A. *Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 3 Akuntansi Sektor Publik*. (Jakarta: Salemba Empat. 2002). h. 45

⁵⁹UU No. 25 Tahun 1999 tentang otonomi daerah dan PP No. 104 Tahun 2000. Tentang dana perimbangan.

dari pemerintah pusat (DAK) dengan alokasi anggaran pengeluaran daerah melalui belanja modal.

Menurut UU No 33 tahun 2004 Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Menurut Daud Widodo DAK merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional⁶⁰. Besarnya DAK yang diterima dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah melalui terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana fisik yang dibutuhkan dalam roda perekonomian. Dengan adanya sarana dan prasarana yang baik akan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

d. Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi

Salah satu sumber dana bagi pemerintahan daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah adalah PAD. PAD didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Penelitian yang dilakukan oleh menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah pada belanja modal⁶¹. Maka dari itu untuk meningkatkan alokasi belanja modalnya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, pemerintah daerah membutuhkan pasokan dari PAD yang lebih tinggi juga.

⁶⁰*Ibid.*

⁶¹Sugiarthina. (2014). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Di Kota Semarang Periode 2005-2009*. .Jurnal Fokus Ekonomi, Stie Pelita Nusantara Semarang.h.67

e. Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi

Dengan semakin tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, pemerintah daerah akan memperbaiki dan melengkapi infrastruktur dan sarana prasarana untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dengan cara meningkatkan belanja modal. Sehingga pemerintah daerah membutuhkan sumber dana yang lebih untuk meningkatkan alokasi belanja modal tersebut. Salah satu sumber dana tersebut adalah DAU, DAU merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi pengaruh DAU pada belanja modal⁶². Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menggunakan DAU untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal.

f. Pengaruh DAK terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi

Dana Alokasi Khusus bertujuan untuk membantu membiayai kebutuhan khusus daerah. Dana alokasi khusus merupakan dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus⁶³ yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah seharusnya dapat meningkatkan sumber dana dan belanja modal. Karena pemerintah akan memperbaiki dan melengkapi infrastruktur dan sarana prasarana untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Salah satu sumber dana yang didapat oleh pemerintah daerah adalah DAK. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Dengan

⁶²*Ibid* hl.69

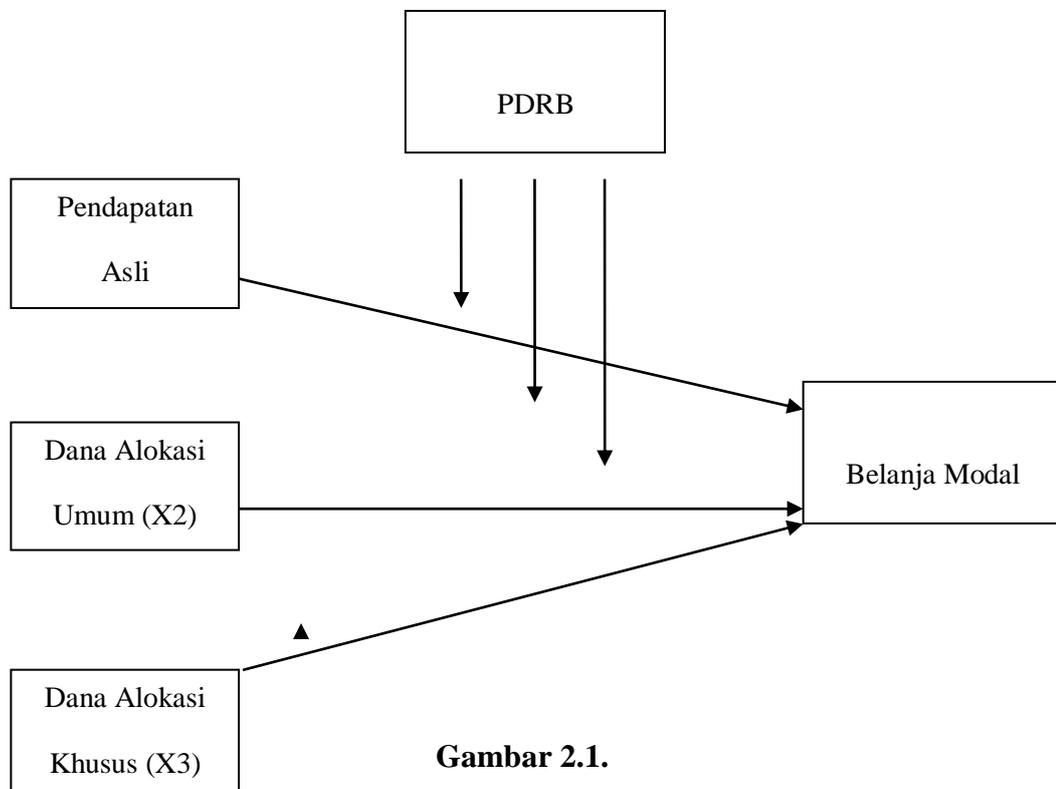
⁶³*Ibid*.

adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

D. Kerangka Berpikir

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X_1) terhadap Belanja Modal, Pengaruh Dana Alokasi Umum (X_2) terhadap Belanja Modal, Pengaruh Dana Alokasi Khusus (X_3) Terhadap Belanja Modal. PDRB sebagai variabel moderasi dapat memperkuat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal, PDRB sebagai variabel moderasi dapat memperkuat pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal, PDRB sebagai variabel moderasi dapat memperkuat pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan latar belakang penelitian, kajian teoritis, kajian penelitian terdahulu dan kerangka diatas maka dapat digambarkan sebuah kerangka berpikir penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1.
Kerangka Berpikir

E. Hipotesa Penelitian

Hipotesa adalah penjelasan sementara tentang satu tingkah laku, gejala-gejala, atau gejala tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Berdasarkan kerangka berfikir yang telah dijelaskan diatas, maka penulis membuat hipotesa yang akan diuji sebagai berikut:

1. H_{a1} : Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Terhadap Belanja Modal
 H_{o1} : Pendapatan Asli Daerah Tidak Berpengaruh Terhadap Belanja Modal
2. H_{a2} : Dana Alokasi Umum Berpengaruh Terhadap Belanja Modal
 H_{o2} : Dana Alokasi Umum Tidak Berpengaruh Terhadap Belanja Modal
3. H_{a3} : Dana Alokasi Khusus Berpengaruh Terhadap Belanja Modal
 H_{o3} : Dana Alokasi Khusus Tidak Berpengaruh Terhadap Belanja Modal
4. H_{a4} : PDRB akan memperkuat pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal
 H_{a4} : PDRB tidak akan memperkuat pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal
5. H_{a5} : PDRB akan memperkuat pengaruh terhadap Dana Alokasi Umum pada Belanja Modal
 H_{a5} : PDRB tidak akan memperkuat pengaruh terhadap Dana Alokasi Umum pada Belanja Modal
6. H_{a6} : PDRB akan memperkuat pengaruh terhadap Dana Alokasi Umum pada Belanja Modal
 H_{a6} : PDRB tidak akan memperkuat pengaruh terhadap Dana Alokasi Umum pada Belanja Modal.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini adalah Penelitian kuantitatif dimana menggunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan oleh penulis bersumber dari hasil laporan Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, penulis menggunakan data yang bersumber dari DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan)⁶⁴. Data sekunder yang bersumber dari BPS (Badan Pusat Statistik)⁶⁵ adalah data PDRB ADHK 2010 (Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan) dan data sekunder yang bersumber dari DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan) adalah data anggaran PAD (Pendapatan Asli Daerah), DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), dan Belanja Modal (BM).

Penulis dalam penelitiannya menggunakan Moderated Regreesion Analysis (MRA) dengan data kurun waktu tertentu (time series). Data time series pada penelitian ini meliputi 25 Kabupaten dan 8 Kota di Sumatera Utara dan data time series pada penelitian ini meliputi tahun 2010 hingga tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian korelasional yang digunakan untuk mencari pengaruh antara variabel bebas yang terdiri atas X1, X2, X3 terhadap Y dengan Z bersifat kuantitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif karena data yang disajikan berupa angka-angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasil penelitian ini diwujudkan dalam angka.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara di Jl. Asrama No.179, Dwi Kora, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20123. dan DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN

⁶⁴<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/> di akses 10/7/2019

⁶⁵<https://sumut.bps.go.id/> di akses 18/6/2019

KEUANGAN (DJPk) di Jl. DR. Wahidin No. 1 Gedung Radius Prawiro Lantai 9. Jakarta Pusat 10710. Yang di akses melalui website <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/> di akses 10/7/2019

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 3 bulan mulai bulan juli sampai dengan bulan september 2019.

C. Populasi dan sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁶⁶ Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara 2010-2018.

2. Sampel

Sampel pada penelita ini dengan mengurutkan tahun yaitu 9 tahun mulai 2010 sampai dengan 2018 (pertahun) dengan 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

D. Definisi Operasional Variabel

Peneliti menggunakan 3 variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel Moderasi, Model terikat dan variabel bebas.

a. Variabel Moderasi (Z)

variabel Moderasi atau Moderated Regression Analysis (MRA) atau uji interaksi merupakan aplikasi khusus regresi berganda linear dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen).⁶⁷ Pertumbuhan Ekonomi merupakan suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang yang kemudian menaikkan kapasitas suatu negara dalam menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Pertumbuhan Ekonomi dapat diketahui dengan menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk skala nasional dan untuk skala regional atau daerah disebut

⁶⁶ Sugiyono. *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2016) h. 215

⁶⁷ Lie Liana. 2009. *Penggunaan MRA dengan Spss untuk Menguji Pengaruh Variabel Moderating terhadap Hubungan antara Variabel Independen dan Variabel Dependen*. h 97

dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat disuatu wilayah, ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota dalam jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar. PDB dapat juga diartikan sebagai barang barang dan jasa jasa yang di produksi di dalam negara tersebut⁶⁸. Tujuan dari PDB dan PDRB adalah meringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi digambarkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang dihitung dengan rumus:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = (\text{PDRBt} - \text{PDRBt-1})/(\text{PDRBt-1}) \times 100\%$$

Keterangan:

PDRBt = Produk Domestik Regional Bruto tahun sekarang

PDRBt-1 = Produk Domestik Regional Bruto tahun sebelumnya⁶⁹

1. Variabel Terikat

Menurut Permendagri Nomor 71 Tahun 2010, Belanja Modal merupakan bagian dari kelompok belanja Daerah, yang memiliki pengertian berupa pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat⁷⁰ lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, dapat di rumuskan:

$$\text{BM} = \text{BT} + \text{BPM} + \text{BGB} + \text{BJIJ} + \text{BATL}$$

Keterangan:

BM = Belanja Modal

BM = Belanja Tanah

BPM = Belanja Peralatan Dan Mesin

BGB = Belanja Gedung Da Bangunan

⁶⁸ Sadono Sukirno. *Makroekonomi Teori Pengantar, cet.3, ed.3* (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), h.34

⁶⁹ Purwanto, F.P. (2013). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal (studi kasus pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2011)*. Skripsi. FE Universitas Negeri Yogyakarta. h.38

⁷⁰ Permendagri No. 71 tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintah.

BJIJ = Belanja Jalan Irigasi Dan Jaringan

BATL = Belanja Aset Tetap Lainnya

2. Variabel Bebas (X)

Variabel bebas dalam penelitian ini terdapat tiga variabel independen, yaitu:

a. Pendapatan Asli Daerah/PAD (X1)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber asli dari daerah itu sendiri dan diperoleh berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD didapatkan dari Hasil Pajak Daerah (HPD), Retribusi Daerah (RD), Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah (PLPD) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah (LPS), yang dirumuskan dengan:

$$\text{PAD} = \text{HPD} + \text{RD} + \text{PLPD} + \text{LPS}$$

Keterangan:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

HPD = Hasil Pajak Daerah

RD = Retribusi Daerah

PLPD = Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah

LPS = Lain-lain Pendapatan yang Sah ⁷¹

b. Dana Alokasi Umum/DAU (X2)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran. Dana transfer dari pemerintah pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Pembangunan dalam sektor pelayanan kepada publik akan merangsang masyarakat untuk lebih aktif dan bergairah dalam bekerja karena sudah ditunjang oleh fasilitas yang memadai. Selain itu investor juga akan tertarik kepada daerah karena fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah sehingga hal tersebut akan memicu peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di daerah. Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi maupun kabupaten/kota dapat dinyatakan sebagai berikut :

⁷¹*Ibid.h.38*

DAU = Celah Fiskal + Alokasi Dasar

Keterangan :

Celah fiskal = kebutuhan fiskal - kapasitas fiskal⁷²

c. Dana Alokasi Khusus/DAK (X3)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Salah satu mekanisme transfer keuangan pemerintah pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju Pertumbuhan Ekonomi antar daerah dan pelayanan antar bidang. Dana Alokasi Khusus untuk masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD. Dana Alokasi Khusus bertujuan untuk membantu membiayai kebutuhan khusus daerah. Dana alokasi khusus merupakan dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus⁷³ yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Bentuk dari teknik dokumentasi berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu, misalnya tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang⁷⁴. Data yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini adalah data Analisis Pengaruh PAD, DAU Dan DAK Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan PDRB Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara.

F. Teknik Analisis Data

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan regresi linier sederhana untuk menguji hipotesis pertama, kedua, ketiga dan regresi linier berganda untuk menguji hipotesis keempat. Analisis data sekunder dibagi ke

⁷²*Ibid.h.38*

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴*Ibid h. 137*

dalam 2 tahap. Pertama akan dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas data, uji Multikolinieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Tahap kedua, melakukan uji hipotesis.

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali, uji normalitas bertujuan untuk menguji model regresi dan variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan Kolmogrov Smirnov Test dengan membandingkan *asymptotic signyfyacance* dengan $\alpha = 0,05$. Dasar penarikan kesimpulan uji normalitas ini adalah data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai *asymptotic signifycacanya* $> 0,05$ ⁷⁵.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah variabel independen memiliki kemiripan dengan variabel independen yang lain. Jika nilai koefisien korelasi antar masing-masing variabel independen kurang dari 0,70, maka model dinyatakan bebas dari asumsi klasik multikolinearitas⁷⁶.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi. Autokorelasi sering terjadi pada sampel dengan data *time series* dengan n – sempel dalam suatu periode tertentu. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan uji *Durbin-Watson (DW test)*⁷⁷. Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut:

⁷⁵ Imam Ghozali. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS: Cetakan IV*. (Universitas Diponegoro, Semarang, 2011). h.135

⁷⁶ Agung Nugroho Bhuono. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS*. (Yogyakarta: Andi, 2005). h.58

⁷⁷ *Ibid.* h.137

- a. Bila nilai DW terletak diantara batas atas atau *upper bound* (du) dan $(4-du)$ maka koefisien autokorelasi = 0, berarti tidak ada autokorelasi.
- b. Bila nilai DW lebih rendah dari batas bawah atau *lower bound* (dl) maka koefisien autokorelasi > 0 , berarti ada autokorelasi positif.
- c. Bila nilai DW lebih besar dari $(4-dl)$ maka koefisien autokorelasi < 0 , berarti ada autokorelasi negatif.
- d. Bila nilai DW terletak antara du dan dl atau DW terletak antara $(4-du)$ dan $(4-dl)$, maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

2. Moderated Regression Analysis (MRA)

Disini penelitin menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA) atau uji interaksi merupakan aplikasi khusus regresi berganda linear dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). MRA ini dilakukan melalui uji signifikansi simultan (uji statistik F) dan uji signifikansi parameter individual (uji statistik),)dengan rumus persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4(X_1 \times Z) + b_5(X_2 \times Z) + b_6(X_3 \times Z) + e$$

Dimana :

Y = Belanja Modal

a = Konstanta

b₁₋₆ = Koefiensi Regresi

X₁ = Pendapatan Asli Daerah

X₂ = Dana Alokasi Umum

X₃ = Dana Alokasi Khusus

Z = Produk Domestik Regional Bruto

Kemudian dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen, terbatas. Sebaliknya, nilai R^2 yang mendekati satu menandakan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan oleh variabel dependen⁷⁸. Nilai yang di gunakan adalah adjusted R^2 karena variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari dua buah. Digunakan untuk mengetahui seberapa besar perubahan variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel independen. Pada penelitian ini berarti seberapa besar perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mampu dijelaskan oleh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara. Koefisien determinasi akan meningkat seiring bertambahnya variabel independen, artinya R^2 merupakan fungsi dari variabel independen. Untuk itu, dibuat alternatif yaitu koefisien determinasi yang disesuaikan atau Adjusted R^2 agar tidak merupakan fungsi variabel independen
- b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) Uji Anova atau F test misal menghasilkan nilai F hitung dengan tingkat signifikansi yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel Y yang di sandarkan dengan variabel moderat, atau dapat dikatakan bahwa variabel X_a , variabel X_b , dan variabel moderat (interaksi antara X_a dan X_b) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y dengan variabel moderasi sebagai penguat atau pelemah dari variabel tersebut. Kemudian Digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara bersama - sama mampu

⁷⁸*Ibid, h.136*

mempengaruhi variabel dependen yang kemudian dimoderasi. Pada penelitian ini berarti, digunakan untuk menguji apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal secara bersama-sama mampu mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung. Adapun dikatakan layak model tersebut apabila prob. F-statistik < dari alpha yang artinya menolak H_0 .

- c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t Statistik) Pada uji statistik t untuk mengetahui apakah variabel independen secara individual mampu mempengaruhi variabel dependen serta variabel moderasi sebagai penguat atau pelemah dari variabel-variabel tersebut. Pada penelitian ini, untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi Belanja Modal, Dana Alokasi Umum mempengaruhi Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus mempengaruhi Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi Belanja Modal dengan dimoderasi PDRB, Dana Alokasi Umum mempengaruhi Belanja Modal dengan dimoderasi PDRB, Dana Alokasi Khusus mempengaruhi Belanja Modal dengan dimoderasi PDRB Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara. Dalam mengetahui apakah variabel independen secara individual mampu mempengaruhi variabel dependen pada penelitian ini yaitu dengan membandingkan nilai probabilitas (p-value) dengan taraf derajat signifikansi satu persen. Dari ke tiga variabel independen (variabel X_a , variabel X_b , dan variabel moderat) yang dimasukkan dalam regresi, jika variabel X_a , variabel X_b , dan variabel moderat (interaksi antara X_a dan X_b) memberikan nilai koefisien parameter dengan tingkat signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X_b adalah variabel moderating. Jika variabel moderat mempunyai tingkat signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditentukan, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X_b bukan merupakan variabel moderating.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Hasil Penelitian Sampel

Data sampel penelitian ini adalah data yang diambil dari pemerintah daerah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Utara antara lain Laporan Realisasi APBD, data Produk Domestik Regional Bruto, data Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus serta Belanja Modal selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 yang diperoleh dari BPS Pusat dan BPS Sumatera Utara dan melalui situs internet departemen keuangan dengan alamat <http://www.djpk.depkeu.go.id/> dan juga dari Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara yang menjadi populasi dari penelitian adalah 25 Kabupaten dan 8 Kota, sebagai berikut:

1	Kab. Asahan	17	Kab. Padang Lawas Utara
2	Kab. Batubara	18	Kab. Pakpak Bharat
3	Kab. Dairi	19	Kab. Samosir
4	Kab. Deli Serdang	20	Kab. Serdang Bedagai
5	Kab. Humbang Hasundutan	21	Kab. Simalungun
6	Kab. Karo	22	Kab. Tapanuli Selatan
7	Kab. Labuhanbatu	23	Kab. Tapanuli Tengah
8	Kab. Labuhanbatu Selatan	24	Kab. Tapanuli Utara
9	Kab. Labuhanbatu Utara	25	Kab. Toba Samosir
10	Kab. Langkat	26	Kota Binjai
11	Kab. Mandailing Natal	27	Kota Gunungsitoli

12	Kab. Nias	28	Kota Medan
13	Kab. Nias Barat	29	Kota Padang Sidempuan
14	Kab. Nias Selatan	30	Kota Pematangsiantar
15	Kab. Nias Utara	31	Kota Sibolga
16	Kab. Padang Lawas	32	Kota Tanjung Balai
		33	Kota Tebing Tinggi

Populasi dari penelitian ini adalah sebanyak 33 pemerintah kabupaten dan kota selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2018. Atas dasar penentuan jumlah sampel yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya, maka diperoleh jumlah sampel dari penelitian selama 2010 sampai dengan 2018 adalah sebesar 33 pemerintah kabupaten dan kota selama 9 tahun penelitian maka diperoleh sebanyak $9 \times 33 = 297$ data pengamatan.

B. Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif statistik dilakukan untuk mengetahui sebaran nilai dari variabel-variabel penelitian. Hal –hal yang akan dikaji dalam membahas analisis deskriptif adakah nilai rata-rata, nilai maksimum dan nilai minimum dari masing-masing variabel. Berikut adalah hasil output perhitungan deskriptif statistik menggunakan SPSS 16.0.

Tabel 4.1.
Descriptive Statistics (Juta Rupiah)

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	297	1028	1739757	102391.43	237613.330
Dana Alokasi Umum	297	0	1611941	493294.58	303250.803

Dana Alokasi Khusus	297	0	459510	85641.74	82377.216
Belanja Modal	297	0	997476	206194.12	139448.383
Produk Domestik Regional Bruto	297	5070	1480060	127782.52	216991.504
Valid N (listwise)	297				

Sumber : Data Skunder yang diolah SPSS; 2019

Dari tabel di atas diperoleh keterangan bahwa dari N sampel sebanyak 297, di mana nilai rata-rata variabel PAD diperoleh keterangan nilai rata-rata sebesar Rp 102,391.43 per tahun, dengan perolehan nilai maksimum sebesar Rp 1,739,757 dan nilai minimumnya sebesar Rp 1,028 dengan standar deviasi Rp 237,613.330 dari rata-rata. PAD merupakan pendapatan daerah yang menggambarkan kemampuan daerahnya dalam merealisasikan PAD yang direncanakan guna membiayai pengeluaran daerah pemerintahannya, berdasarkan potensi riil daerah. Secara keseluruhan PAD Provinsi Sumatera Utara mengalami kenaikan, peningkatan PAD ini merupakan akibat perkembangan pesat pajak daerah dan retribusi daerah.

Pada variabel DAU diperoleh keterangan nilai rata-ratanya sebesar Rp 493,294.58 per tahun, dengan nilai maksimum sebesar Rp 161,1941 dan nilai minimumnya sebesar Rp 0 dengan standar deviasi Rp 303,250.803 dari rata-rata. Dana Alokasi Umum (DAU) berperan penting dalam mewujudkan pemerataan keuangan antar daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pada variabel DAK diperoleh keterangan nilai rata-rata sebesar Rp 85,641.74 per tahun, dengan perolehan nilai maksimum sebesar Rp 459,510 dan nilai minimumnya sebesar Rp 0 dengan standar deviasi Rp 82,377.216 dari rata-rata. Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berasal dari APBN dialokasikan kepada daerah agar berfungsi dalam membiayai kebutuhan tertentu untuk menutup

kesenjangan publik antar daerah dengan memberi prioritas pendidikan, pertanian prasarana pemerintahan daerah dan lingkungan hidup.

Pada variable BM diperoleh keterangan nilai rata-rata sebesar Rp 206,194.12 per tahun, nilai maksimum sebesar Rp997,476 dan nilai minimumnya sebesar Rp0 dengan standar deviasi Rp 139,448.383 dari rata-rata. Belanja modal mempunyai pengaruh yang begitu penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan akan memiliki daya ungkit dalam menggerakkan roda perekonomian daerah, karena alokasi belanja modal adalah alokasi dana yang mendukung dalam penyediaan dan pembangunan infrastruktur publik.

Variabel PDRB yang diperoleh dari 33 Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara selama tahun 2010-2018 menunjukkan rata-rata sebesar Rp 127,782.52 per tahun, dengan perolehan nilai maksimum sebesar Rp 1480060 dan nilai minimumnya sebesar Rp 5,070 dengan standar deviasi Rp 216,991.504 dari rata-rata. Dengan melihat angka laju pertumbuhan ekonomi (PDRB) pada suatu daerah maka dapat memberikan gambaran bagaimana pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai oleh daerah tersebut.

C. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Untuk analisis tersebut maka terlebih dahulu diuji untuk tidak adanya masalah penyimpangan terhadap asumsi klasik.

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel-variabel independen dan variabel dependen mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan uji statistik. Test statistik yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov test. Hasil pengujian diperoleh dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		297
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	6.22442582E4
Most Extreme Differences	Absolute	.066
	Positive	.066
	Negative	-.055
Kolmogorov-Smirnov Z		1.144
Asymp. Sig. (2-tailed)		.146
a. Test distribution is Normal.		

Sumber : Data Skunder yang diolah SPSS 2019

Berdasarkan nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 1.144 dan signifikansi pada $0.146 > 5\%$ ($\alpha = 0,05$). Dalam hal ini berarti data residual berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Pengujian terhadap gejala multikolinieritas ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi/hubungan yang kuat antar variabel-variabel independen dalam model persamaan regresi. Adanya multikolinieritas dalam model persamaan regresi yang digunakan akan mengakibatkan ketidakpastian estimasi, sehingga mengarahkan kesimpulan yang menerima hipotesis nol. Hal ini

menyebabkan koefisien regresi menjadi tidak signifikan dan standar deviasi sangat sensitif terhadap perubahan data. Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan menggunakan korelasi antar variabel penelitian *tolerance* dan VIF. Hasil pengujian multikolinieritas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	t	Sig.	Collinearity Statistics	
			Tolerance	VIF
1(Constant)	14.599	.000		
Pendapatan Asli Daerah	5.598	.000	.085	11.798
Dana Alokasi Umum	1.213	.226	.288	3.476
Dana Alokasi Khusus	6.060	.000	.521	1.918
Produk Domestik Regional Bruto	2.799	.005	.066	15.155

a. Dependent Variable:
Belanja Modal

Sumber : Data sekunder yang diolah SPSS 2019

Variabel	Nilai VIF	Keterangan
PAD (X1)	11.798	Terjadi Multikolinieritas
DAU (X2)	3.476	Tidak Terjadi Multikolinieritas
DAK (X3)	1.918	Tidak Terjadi Multikolinieritas
PDRB (Z)	15.155	Terjadi Multikolinieritas

Pengujian multikolinierits menggunakan nilai VIF menunjukkan bahwa nilai VIF PAD dan PDRB mengalami Multikolinieritas yakni 11.798 dan 15.155

dimana nilai VIF > 10. Sedangkan variabel DAU dan DAK tidak terjadi multikolinieritas yang menunjukkan nilai VIF < 10.

c. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk menguji autokorelasi digunakan uji Durbin Watson.. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan residual adalah acak atau random. Berikut ini hasil uji autokorelasi dalam model regresi:

Tabel 4.4.
Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.895 ^a	.801	.798	62669.139	1.334

a. Predictors: (Constant), Produk Domestik Regional Bruto, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Data Skunder yang diolah SPSS, 2019

Hasil uji Durbin watson menunjukkan nilai DW dipeorleh sebesar 1,334 yang berada diantara $du = 1.82$ dan $4 - du = 2,18$. Dengan demikian nilai DW berada diantara du dan $4 - du$. Dengan demikian model regresi tidak memiliki masalah autokorelasi.

2. Pengujian Hipotesis

a. Moderated Regression Analysis (MRA)

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dengan menggunakan model regresi berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA) atau uji interaksi merupakan aplikasi khusus regresi berganda linear dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen).

Analisis regresi berganda bertujuan mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, dan juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan independen. Analisis regresi berganda dilakukan dengan menggunakan uji koefisien determinasi (R^2), uji F (uji simultan) dan uji t (uji parsial).

b. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi menunjukkan besarnya pengaruh variabel bebas yaitu PDRB, DAU, DAK dan PAD secara bersama–sama terhadap belanja modal.

Tabel 4.5.
Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.904 ^a	.818	.813	60286.617

a. Predictors: (Constant), X3 x Z, X1 x Z, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, X2 x Z, Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Data Skunder yang diolah SPSS, 2019

Nilai koefisien determinasi dari hasil perhitungan dapat kita ketahui bahwa nilai koefisien determinasi (adjusted R Square) adalah sebesar 0,818 atau 81,8%. Hal ini berarti bahwa variabel PAD, DAU, DAK, PDRB, dan MODERASI secara bersama – sama memiliki pengaruh sebesar 81,8% terhadap alokasi anggaran Belanja Modal. Sedangkan sisanya sebesar 0,182 atau 18.2 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian tersebut.

c. Uji Simultan (Uji F)

Uji model dilakukan dengan menggunakan uji F yaitu menguji pengaruh variabel PDRB, PAD, DAU dan DAK secara bersama–sama terhadap alokasi anggaran untuk belanja modal.

Tabel 4.6.
Uji Simultan

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.706E12	7	6.722E11	184.959	.000 ^a
	Residual	1.050E12	289	3.634E9		
	Total	5.756E12	296			

a. Predictors: (Constant), X3 x Z, X1 x Z, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, X2 x Z, Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Data Skunder yang diolah SPSS, 2019

Hasil pengujian disajikan pada Tabel 4.7 sebelumnya. Dari hasil perhitungan dapat kita ketahui bahwa F hitung (184.959) dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian

dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh dari PDRB, DAU, DAK,PAD dan MODERASI secara bersama–sama terhadap alokasi anggaran Belanja Modal.

d. Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial (uji t) adalah untuk melihat pengaruh variabel-variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikatnya dan kemudian yang dimoderasi. Pada uji statistik t untuk mengetahui apakah variabel independen secara individual mampu mempengaruhi variabel dependen serta variabel moderasi sebagai penguat atau pelemah dari variabe-variabel tersebut. Pada penelitian ini, untuk mengetahui apakah Penadapan Asli Daerah mempengaruhi Belanja Modal, Dana Alokasi Umum mempengaruhi Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus mempengaruhi Belanja Modal, Penadapan Asli Daerah mempengaruhi Belanja Modal dengan dimoderasi PDRB, Dana Alokasi Umum mempengaruhi Belanja Modal dengan dimoderasi PDRB , Dana Alokasi Khusus mempengaruhi Belanja Modal dengan dimoderasi PDRB Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara Berikut adalah hasil perhitungan nilai t hitung dan taraf signifikansinya dalam penelitian ini:

Tabel 4.8.
Uji Model t dengan variabel moderasi

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	91612.544	8590.678		10.664	.000
Pendapatan Asli Daerah	.536	.085	.913	6.327	.000
Dana Alokasi Umum	.022	.027	.049	.823	.411
Dana Alokasi Khusus	.440	.082	.260	5.371	.000

Produk Domestik Regional Bruto	.255	.065	.397	3.946	.000
X1 x Z	-1.767E-7	.000	-.377-	-3.245-	.001
X2 x Z	-4.904E-8	.000	-.099-	-1.163-	.246
X3 x Z	-3.636E-7	.000	-.117-	-2.289-	.023

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Data Skunder yang diolah SPSS, 2019

Model persamaan regresi diperoleh sebagai berikut:

1. jika nilai sig < 0,05, atau t hitung > t tabel maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y
2. jika nilai sig > 0,05, atau t hitung < t tabel maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y

$$t \text{ tabel} = t (a/2; n-k-1) = t (0,025; 297) = 1,697$$

$$\text{BM} = 91612.544 + 0.536\text{PAD} + 0,022\text{DAU} + 0,440\text{DAK} + 0.255\text{PDRB} + -1.767\text{E-}7\text{X1xZ} + -4.904\text{E-}8\text{X2xZ} + -3.636\text{E-}7\text{X3xZ} + e$$

Berdasarkan hasil uji t (uji parsial) pada tabel 4.8 hasil pengujian hipotesis diperoleh sebagai berikut:

1. Hasil uji moderasi untuk H1 diperoleh hasil t-hitung sebesar 6.327 dengan signifikansi sebesar 0,00. Nilai signifikan untuk variabel PAD menunjukkan nilai diatas tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan

nilai t-hitung $6.327 > t$ -tabel sebesar $1,697$ yang artinya bahwa H_0 diterima sehingga terdapat pengaruh PAD terhadap Belanja Modal.

2. Hasil uji moderasi untuk H_2 diperoleh hasil t-hitung sebesar 0.823 dengan signifikansi sebesar $0,411$. Nilai signifikan untuk variabel DAU menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai t-hitung $0.823 < t$ -tabel sebesar $1,697$ yang artinya bahwa DAU tidak dapat berpengaruh terhadap belanja modal.
3. Hasil uji moderasi untuk H_3 diperoleh hasil t-hitung sebesar 5.731 dengan signifikansi sebesar $0,00$. Nilai signifikan untuk variabel DAK menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai t-hitung $5,731 > t$ -tabel sebesar $1,697$ yang artinya bahwa H_3 diterima sehingga terdapat pengaruh yang positif DAK terhadap Belanja Modal.
4. Hasil uji moderasi untuk H_4 diperoleh hasil t-hitung sebesar -3.245 dengan signifikansi sebesar $0,001$. Nilai signifikan untuk variabel $X_1 \times Z$ menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai t-hitung $-3.245 > t$ -tabel sebesar $1,697$ yang artinya bahwa PDRB berpengaruh dan dapat memoderasi hubungan PAD pada belanja modal dengan intensitas dan arah yang berlawanan, sehingga H_4 ditolak.
5. Hasil uji moderasi untuk H_5 diperoleh hasil t-hitung sebesar -1.163 dengan signifikansi sebesar $0,246$. Nilai signifikan untuk variabel $X_2 \times Z$ menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai t-hitung $-1.163 < t$ -tabel sebesar $1,697$ yang artinya bahwa PDRB berpengaruh negatif dan tidak dapat memoderasi hubungan DAU pada belanja modal dengan intensitas dan arah yang berlawanan.

6. Hasil uji moderasi untuk H6 diperoleh hasil t-hitung sebesar -2,289 dengan signifikansi sebesar 0,023. Nilai signifikan untuk variabel X3xZ menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai t-hitung $-2,289 > t\text{-tabel}$ sebesar 1,697 yang artinya bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh dan dapat memoderasi hubungan DAK pada belanja modal dengan intensitas dan arah yang berlawanan, sehingga H6 ditolak.

3. Pembahasan

a. Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa PAD berpengaruh terhadap belanja modal, yang berarti H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara bergantung kepada Pendapatan Asli Daerah untuk membelanjakan modal yang digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dengan tujuan menunjang sarana dan prasarana publik yang baik serta infrastruktur yang meningkatkan pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah juga merupakan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, dalam meningkatkan dana yang diperoleh untuk menjadi sumber pembelanjaan daerah maka pemerintah daerah harus meningkatkan potensi daerah yang dimiliki. Jika pembangunan berbagai sarana dan prasarana publik dapat ditingkatkan maka Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh juga semakin meningkat. Karena peningkatan sarana dan prasarana dibelanjakan melalui belanja modal. Jadi semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah semakin tinggi juga alokasi belanja modal yang diperoleh. Hasil penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh (cahyaning 2016) yang membuktikan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.

b. Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil ini menjelaskan bahwa kabupaten/kota yang

mendapatkan DAU yang kecil akan cenderung memiliki belanja modal yang tinggi. Hal ini terjadi karena DAU digunakan untuk membiayai belanja yang lain seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja lainnya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (cahyaning 2016) memberikan hasil yang sama dengan penelitian ini yaitu DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini disebabkan DAU lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja yang lain. Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan hasil penelitian ini dimana DAU tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal namun dengan arah negatif. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nurin Hidayati 2014) yaitu DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, yang mengatakan bahwa semakin tinggi DAU maka alokasi belanja modal juga semakin meningkat. Dari berbagai pemaparan diatas dapat disimpulkan jika DAU semakin meningkat maka alokasi belanja modal semakin rendah.

c. Pengaruh DAK terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa DAK memiliki pengaruh yang positif terhadap belanja modal, yang berarti H3 diterima. Hasil ini menjelaskan bahwa kabupaten/kota yang mendapatkan DAK yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang besar pula. Hasil ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi oleh sumber penerimaan DAK.

Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurin Hidayati (2016) menunjukkan hasil bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan

penelitian yang dilakukan oleh Siti Aisyah (2014), yaitu DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini dapat dikarenakan penggunaan sampel dan periode waktu yang berbeda. Dari berbagai pemaparan di atas dapat disimpulkan jika anggaran DAK meningkat maka alokasi belanja modal pun meningkat.

d. Pengaruh antara PAD terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh dan dapat memoderasi hubungan PAD pada alokasi belanja modal dengan intensitas dan arah yang berlawanan. Hasil ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki kontribusi positif terhadap pengalokasian belanja modal yang kemudian berdampak pada hubungan PAD terhadap pengalokasian belanja modal.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurin Hidayati (2016) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan dan tidak mampu memoderasi hubungan antara PAD dengan pengalokasian belanja modal. Dari berbagai pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa semakin rendah pertumbuhan ekonomi maka pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada belanja modal semakin rendah pula. Artinya, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka pengaruh PAD pada belanja modal semakin menurun.

e. Pengaruh antara DAU terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh dan tidak dapat memoderasi hubungan DAU pada alokasi belanja modal dengan intensitas dan arah yang berlawanan. Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk pengadaan sarana prasarana, fasilitas serta infrastruktur bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketika suatu daerah mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi, maka daerah tersebut juga mengalami penurunan alokasi belanja modal. Dengan demikian, pemerintah daerah menggunakan DAU untuk memberikan pelayanan kepada

publik sesuai dengan pertumbuhan ekonomi yang direalisasikan melalui belanja modal.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurin Hidayati (2016) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan dan tidak mampu memoderasi hubungan antara DAU dengan pengalokasian belanja modal. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan tetapi memperlemah pengaruh antara PAD pada belanja modal. Dari berbagai pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka pengaruh Dana Alokasi Umum pada belanja modal semakin meningkat.

f. Pengaruh antara DAK terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh dan dapat memoderasi hubungan DAK pada belanja modal dengan intensitas dan arah yang berlawanan. Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk pengadaan sarana prasarana, fasilitas serta infrastruktur bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah karena pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah.

Ketika suatu daerah telah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah daerah akan mengurangi pengalokasian belanja modalnya dan menggunakan DAK tersebut untuk kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional lainnya selain belanja modal.

Hal ini karena tujuan pemerintah daerah melakukan belanja modal yaitu untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi sudah tercapai. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan tetapi memperlemah pengaruh antara DAK pada belanja modal. Artinya, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka pengaruh DAK pada belanja modal semakin menurun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Secara parsial hasil penelitian Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara.
2. Secara parsial hasil penelitian Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara.
3. Secara parsial hasil penelitian Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara.
4. Secara parsial Produk Domestik Regional Bruto Sebagai variabel moderasi memperlemah Pendapatan Asli Daerah dan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara.
5. Secara parsial Produk Domestik Regional Bruto Sebagai variabel moderasi memperkuat Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara.
6. Secara parsial Produk Domestik Regional Bruto Sebagai variabel moderasi memperlemah Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menganalisis model penelitian dengan menggunakan Moderasi dengan menunjukkan perolehan dari perbedaan kondisi PAD, dana perimbangan (DAU dan DAK), pertumbuhan ekonomi maupun belanja modal yang terjadi pada masing-masing wilayah Kabupaten/Kota.

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengubah model penelitian dengan menambahkan variabel seperti halnya variabel non keuangan. Variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintah daerah dapat menjelaskan dengan baik seberapa besar tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertumbuhan ekonomi daerah setempat dalam mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

C. Implikasi

Bagi Pemerintah Daerah diharapkan dapat:

1. Mengalokasikan Belanja Modal Dimana Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (DAU dan DAK), serta PDRB Sebagai Moderasi untuk diprioritaskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Mengoptimalkan potensi ekonomi lokalnya untuk menambah penerimaan daerah sehingga tercipta kemandirian daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran sehingga pada akhirnya ketergantungan pada pemerintah pusat dapat dikurangi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Y. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Aisyah, Siti. 2014. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah Tahun 2010-2012)*. Dalam skripsi Universitas Islam Sultan Agung.
- Bastian Indra, 2002. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: salemba empat.
- Bhuono, Agung Nugroho. 2005. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi.
- Boediono. 1985. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Cahyaning, dkk. 2017. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015*. Dalam *Accounting Analysis Journal* 2 (1) 2017.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an Terjemahan.
- Dewi, Ni Wayan R. dan Suputra, I Dewa G. D. 2017. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.18. No 3. 1745-1773

- Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus, Dan Dewan Pertimbangan
Otonomi Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam
Negeri Republik Indonesia 2014.
- Fauzi dan Iskandar. *Cara Membaca APBD*. (Malang: Brawijaya University
Press, 1995).
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program
SPSS: Cetakan IV*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- H.R. Bukhari... Muhammad Amin. 2013. *Tafsir Ayat Ekonomi*. Jakarta: Sinar
Grafika Offset
- Halim, A. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 3 Akuntansi Sektor Publik*.
Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. 2009. *Akuntansi sector Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi
Pertama*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2008. *Manajemen Keuangan Daerah (Bunga Rampai)*. Yogyakarta
Penerbit UPP AMP YKPN
- HAW, W. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada.
- Hidayati, Nurin. 2016. *Analisis Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap
Alokasi Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel
Moderasi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa
Tengah. Dalam skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta* .
- Irawan. S. 1997. *Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE.
- Isnaini, dkk. 2015. *Hadis-hadis Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2013

- Liana, Lie. 2009. *Penggunaan MRA dengan Spss untuk Menguji Pengaruh Variabel Moderating terhadap Hubungan antara Variabel Independen dan Variabel Dependen*. Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK Volume XIV, No.2, Juli 2009 : 90-97
- Mamesah, D. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mawarni, dkk. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Aceh). Jurnal Akuntansi Volume 2, No.2
- Nachrowi, N. D., dan Usman, H. 2006. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Uni versitas Indonesia.
- Pasal 1 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
- Pasal 54 PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.91/PMK.06/2007.
- Permendagri No. 71 tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintah.
- Permendagri No. 71 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
- PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan.
- Prakosa, Kesit Bambang, 2004. "Analisa Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Provinsi Jawa Tengah dan DIY)". *JAAI Vol. 8 No. 2*

- Purwanto, F.P. 2013. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal (studi kasus pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2011)”. *Skripsi*. FE Universitas Negeri Yogyakarta.
- Siahaan. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiarthina. 2014. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Di Kota Semarang Periode 2005-2009*. Jurnal Fokus Ekonomi, Stie Pelita Nusantara Semarang
- Sugiyono. 2016. *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suprayitno, Bambang. 2015. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Anggaran Belanja Modal*.
- Suprianto, Dedi. 2016. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Pemerintah di Kabupaten Nagan Raya*.
- Tambunan, T. 2006. *Upaya-upaya Meningkatkan Daya Saing Daerah*.
www.kardin-indonesia.or.id. . Di akses 10/9/2019
- Tarigan, Azhari Akmal. 2012. *Tafsir ayat-ayat ekonomi sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata Kunci Dalam Al-Qur'an*. (Medan: Citapustaka Media Perintis)
- Undang – Undang tentang regulasi Pajak Daerah dan retribusi Daerah, melalui Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- UU No. 25 Tahun 1999 tentang otonomi daerah dan PP No. 104 Tahun 2000. Tentang dana perimbangan.
- Undang-undang No 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.

Undang-Undang No.33 Tahun 2004. tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

<http://www.bi.go.id/> di akses pada 14/6/2019

<https://www.bps.go.id/di> akses pada 12/6/2019

<https://sumut.bps.go.id/di> akses pada 18/6/2019

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/di> akses pada 10/7/2019

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN TABEL

Lampiran 1

Tabel 4.1.
Descriptive Statistics (Juta Rupiah)

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	297	1028	1739757	102391.43	237613.330
Dana Alokasi Umum	297	0	1611941	493294.58	303250.803
Dana Alokasi Khusus	297	0	459510	85641.74	82377.216
Belanja Modal	297	0	997476	206194.12	139448.383
Produk Domestik Regional Bruto	297	5070	1480060	127782.52	216991.504
Valid N (listwise)	297				

Tabel 4.2.
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		297
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	6.22442582E4
Most Extreme Differences	Absolute	.066
	Positive	.066
	Negative	-.055
Kolmogorov-Smirnov Z		1.144
Asymp. Sig. (2-tailed)		.146

a. Test distribution is Normal.

Lampiran 2

Tabel 4.3.
Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	t	Sig.	Collinearity Statistics	
			Tolerance	VIF
1(Constant)	14.599	.000		
Pendapatan Asli Daerah	5.598	.000	.085	11.798
Dana Alokasi Umum	1.213	.226	.288	3.476
Dana Alokasi Khusus	6.060	.000	.521	1.918
Produk Domestik Regional Bruto	2.799	.005	.066	15.155

a. Dependent Variable:
Belanja Modal

Tabel 4.4.
Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.895 ^a	.801	.798	62669.139	1.334

a. Predictors: (Constant), Produk Domestik Regional Bruto, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Lampiran 3

Tabel 4.5.
Koefisien Determinasi sebelum dimoderasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.895 ^a	.801	.798	62669.139

a. Predictors: (Constant), Produk Domestik Regional Bruto, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Tabel 4.6.
Uji Simultan sebelum dimoderasi

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.609E12	4	1.152E12	293.396	.000 ^a
	Residual	1.147E12	292	3.927E9		
	Total	5.756E12	296			

a. Predictors: (Constant), Produk Domestik Regional Bruto, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Lampiran 4

Tabel 4.7.
Uji Parsial sebelum dimoderasi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	107459.756	7360.708		14.599	.000
	Pendapatan Asli Daerah	.295	.053	.502	5.598	.000
	Dana Alokasi Umum	.027	.022	.059	1.213	.226
	Dana Alokasi Khusus	.371	.061	.219	6.060	.000
	Produk Domestik Regional Bruto	.018	.007	.285	2.799	.005

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Tabel 4.8.
Koefisien Determinasi setelah dimoderasi

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.904 ^a	.818	.813	60286.653

a. Predictors: (Constant), DAK*PDRB, PAD*PDRB, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, DAK*PDRB, Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Lampiran 5

Tabel 4.9.
Uji Simultan setelah dimoderasi
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.706E12	7	6.722E11	184.959	.000 ^b
	Residual	1.050E12	289	3.634E9		
	Total	5.756E12	296			

a. Predictors: (Constant), DAK*PDRB, PAD*PDRB, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, DAU*PDRB, Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah b. Dependent Variable: Belanja Modal

Tabel 4.10.
Uji Model t dengan variabel moderasi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	91612.503	8590.683		10.664	.000
Pendapatan Asli Daerah	.536	.085	.913	6.327	.000
Dana Alokasi Umum	.022	.027	.049	.823	.411
Dana Alokasi Khusus	.440	.082	.260	5.371	.000
Produk Domestik Regional Bruto	.026	.006	.397	3.946	.000
PAD*PDRB	-1.767E-8	.000	-.377	-3.245	.001
DAU*PDRB	-4.904E-9	.000	-.099	-1.163	.246
DAK*PDRB	-3.636E-8	.000	-.117	-2.289	.023

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Data PDRB, DAU, DAK, dan Belanja Modal Kab./Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2018

(dalam Ratus Ribu Rupiah)

NO	Nama Daerah	Tahun	PDRB	PAD	DAU	DAK	Belanja Modal
1	Kab. Asahan	2010	160,767,289	259,822	479,299	482,883	980,054
		2011	169,396,957	318,443	523,562	506,264	1,792,384
		2012	178,724,108	378,946	628,975	652,067	2,592,274
		2013	188,926,241	536,917	733,672	798,755	2,717,531
		2014	200,030,785	914,682	795,351	679,543	4,241,883
		2015	211,170,243	982,793	817,747	978,069	2,274,383
		2016	223,082,050	521,703	891,150	2,251,647	2,376,770
		2017	235,250,021	1,236,873	875,860	2,050,869	3,501,460
		2018	248,441,002	1,429,720	877,795	2,332,047	2,302,001
2	Kab. Dairi	2010	42,382,457	198,357	336,865	441,138	811,706
		2011	44,470,939	176,735	372,373	441,447	746,022
		2012	46,710,008	209,115	451,176	433,572	979,843
		2013	49,068,592	299,334	512,477	611,256	1,388,599
		2014	51,538,263	535,259	532,723	489,922	1,557,121
		2015	54,137,487	587,918	560,602	526,972	1,800,981
		2016	56,884,509	680,032	623,702	1,472,313	2,179,412
		2017	59,692,313	1,284,898	612,746	1,608,248	2,607,060
		2018	62,682,112	1,284,898	612,746	1,608,248	2,607,060
3	Kab. Deli Serdang	2010	430,400,053	1,205,372	793,142	855,899	2,030,015
		2011	452,577,327	2,137,915	888,557	671,782	3,147,460
		2012	475,138,657	2,910,175	1,100,014	654,782	3,342,544
		2013	518,960,620	3,283,481	1,260,755	818,676	3,523,343
		2014	557,907,491	4,338,855	1,363,811	1,046,877	5,537,059
		2015	587,136,736	5,152,937	1,396,298	1,173,327	4,917,102
		2016	618,396,749	5,730,104	1,494,821	4,083,393	5,612,856
		2017	649,921,123	8,492,862	1,468,562	4,595,102	7,414,569
		2018	683,411,212	7,296,486	1,468,562	4,552,420	6,705,842
4	Kab. Karo	2010	92,311,791	276,856	401,710	475,180	921,294
		2011	97,615,530	353,633	441,567	424,390	1,284,479
		2012	102,583,447	412,430	546,295	384,266	1,531,955
		2013	107,659,853	463,427	625,822	481,201	2,453,587
		2014	113,143,867	729,141	686,835	562,926	1,556,650
		2015	118,809,277	876,443	697,458	1,347,391	3,000,982
		2016	124,948,674	999,133	751,581	2,647,889	2,310,984
		2017	131,465,142	1,578,667	738,378	2,030,053	3,359,352
		2018	137,441,454	1,591,892	738,378	1,849,601	2,221,168
5	Kab. Labuhanbatu	2010	145,261,899	385,322	315,309	450,549	1,257,574
		2011	153,554,077	509,586	367,738	455,088	1,154,538
		2012	162,899,764	594,392	461,644	754,967	2,041,229
		2013	172,634,119	497,846	520,458	497,385	2,266,938
		2014	181,651,015	1,098,969	561,476	402,247	2,090,256
		2015	190,809,947	1,010,232	593,026	769,282	1,855,154
		2016	200,460,191	1,259,253	696,646	2,489,583	2,850,897
		2017	210,484,845	1,246,740	684,408	1,765,146	2,779,210
		2018	221,123,122	1,627,945	680,408	1,993,522	1,391,784

NO	Nama Daerah	Tahun	PDRB	PAD	DAU	DAK	Belanja Modal
6	Kab. Langkat	2010	183,860,046	313,570	655,701	658,657	1,173,929
		2011	195,947,351	345,406	736,888	538,727	1,190,401
		2012	208,586,799	1,292,426	847,503	560,567	2,550,526
		2013	220,294,792	655,215	982,658	811,657	3,082,122
		2014	231,571,182	1,078,120	1,039,651	671,626	3,295,428
		2015	243,216,065	1,227,154	1,099,487	1,462,539	4,972,575
		2016	255,338,096	1,326,732	1,200,481	3,667,844	6,262,955
		2017	268,232,155	1,397,176	1,179,393	4,117,651	4,926,378
		2018	281,713,213	1,366,806	1,179,393	3,940,096	3,805,760
7	Kab. Mandailing Natal	2010	55,084,998	118,259	398,482	581,314	1,061,232
		2011	58,443,088	275,258	455,393	484,516	882,181
		2012	62,108,212	212,741	541,107	415,558	1,330,467
		2013	66,064,437	476,658	625,543	387,913	1,416,262
		2014	70,349,252	379,657	692,134	598,755	1,817,682
		2015	74,717,175	638,475	722,942	782,651	2,386,778
		2016	79,350,326	704,059	788,477	2,365,852	2,488,985
		2017	84,164,152	805,817	-	-	2,518,219
		2018	89,040,011	848,099	783,200	2,487,995	1,998,490
8	Kab. Nias	2010	15,621,168	176,296	151,147	537,909	830,371
		2011	16,712,109	189,439	265,218	549,431	1,440,515
		2012	17,760,487	298,217	289,608	481,373	1,531,049
		2013	18,887,588	447,261	336,470	646,032	1,734,293
		2014	19,977,496	650,822	347,699	720,923	1,580,983
		2015	21,080,359	708,926	365,879	1,489,390	1,943,307
		2016	22,141,533	828,404	429,583	1,684,408	2,275,595
		2017	23,254,614	957,262	-	-	2,395,239
		2018	24,321,254	887,546	428,647	1,667,858	2,070,169
9	Kab. Simalungun	2010	170,113,722	452,556	644,611	620,531	1,489,243
		2011	180,248,029	425,434	696,225	739,454	1,321,024
		2012	191,175,431	612,465	865,406	908,686	3,148,915
		2013	201,220,123	979,148	977,809	807,740	2,343,485
		2014	211,942,831	963,902	1,077,986	780,639	2,263,708
		2015	223,041,107	1,118,933	1,084,974	999,977	1,856,769
		2016	235,079,700	1,325,608	1,230,816	3,347,287	2,109,532
		2017	247,164,756	2,526,630	-	-	2,937,135
		2018	259,962,159	1,641,079	1,177,957	3,649,577	4,052,833
10	Kab. Tapanuli Selatan	2010	53,025,114	304,968	334,738	414,954	1,086,286
		2011	56,379,880	574,638	375,894	444,919	1,378,358
		2012	61,504,948	561,601	454,322	533,670	1,941,937
		2013	72,226,127	692,205	517,343	543,217	2,674,543
		2014	75,432,831	955,882	572,098	635,477	2,223,502
		2015	79,100,105	1,093,495	592,764	1,073,939	3,039,150
		2016	83,144,884	766,407	654,669	2,150,467	3,071,523
		2017	87,484,516	1,047,226	-	-	2,772,319
		2018	92,021,200	1,400,442	642,196	1,652,454	3,631,402
11	Kab. Tapanuli Tengah	2010	44,743,249	133,718	313,957	512,999	-
		2011	47,025,244	182,097	343,731	523,001	996,832
		2012	49,430,413	211,368	422,612	486,442	1,541,998

NO	Nama Daerah	Tahun	PDRB	PAD	DAU	DAK	Belanja Modal
		2013	51,990,175	232,107	491,011	832,543	2,585,934
		2014	54,608,461	553,644	541,492	756,898	1,022,106
		2015	57,383,205	652,247	558,242	1,745,797	2,237,146
		2016	60,322,126	717,590	633,514	1,981,878	1,694,027
		2017	63,481,020	727,103	-	-	1,675,213
		2018	66,781,200	766,609	627,028	2,410,185	2,207,474
12	Kab. Tapanuli Utara	2010	38,318,187	154,330	369,275	480,185	957,659
		2011	40,023,960	360,632	405,823	567,916	1,881,436
		2012	41,986,334	340,231	487,346	502,206	1,715,082
		2013	44,197,744	379,544	552,463	557,780	2,068,955
		2014	46,423,258	636,961	596,841	483,169	1,464,643
		2015	48,694,782	827,535	616,216	1,233,487	2,405,499
		2016	50,701,948	947,832	650,827	2,171,532	2,389,284
		2017	52,811,031	1,624,419	-	-	1,558,450
		2018	55,102,011	1,056,568	639,394	1,911,026	1,816,620
		13	Kab. Toba Samosir	2010	36,337,329	119,886	280,450
2011	37,927,022			141,177	310,252	514,347	1,045,527
2012	39,852,124			165,427	387,623	521,198	1,539,809
2013	41,784,961			198,032	423,292	460,362	1,255,769
2014	43,554,225			260,144	495,377	677,841	1,561,471
2015	45,515,109			309,526	506,844	784,873	1,541,068
2016	47,698,055			543,913	537,941	1,715,537	1,812,130
2017	50,020,056			548,408	-	-	1,992,300
2018	52,500,212			522,990	528,491	1,585,831	1,529,702
14	Kota Binjai	2010	49,604,246	188,329	293,537	248,315	530,731
		2011	52,362,740	264,701	336,779	252,662	1,319,399
		2012	55,536,260	481,781	416,965	237,780	1,582,090
		2013	58,909,669	491,726	477,554	196,558	1,331,027
		2014	62,342,884	719,671	526,070	315,342	1,532,848
		2015	65,712,040	783,278	541,896	405,553	1,749,721
		2016	69,355,540	973,395	574,469	1,414,906	2,029,432
		2017	73,102,103	1,392,176	-	-	1,540,600
		2018	77,094,759	1,358,709	564,378	1,299,361	2,142,542
15	Kota Medan	2010	906,154,577	5,889,415	846,541	672,010	4,234,435
		2011	976,755,791	9,950,726	1,066,354	815,946	6,818,840
		2012	1,051,619,983	11,471,241	1,153,789	662,983	5,584,287
		2013	1,107,954,163	12,061,697	1,270,245	620,169	6,308,030
		2014	1,175,250,594	13,842,461	1,393,505	555,822	7,838,832
		2015	1,242,699,314	14,897,232	1,232,071	-	9,168,880
		2016	1,320,628,635	15,353,096	1,611,941	646,406	9,365,991
		2017	1,397,394,151	17,397,569	-	-	9,974,760
		2018	1,480,060,102	16,362,045	1,583,624	3,567,888	7,539,969
16	Kota Pematang Siantar	2010	59,298,779	259,109	313,942	231,074	695,711
		2011	63,333,061	447,927	352,526	247,832	730,172
		2012	67,535,613	499,154	429,632	284,471	908,319
		2013	71,418,595	613,580	492,115	413,997	1,340,099
		2014	75,944,288	904,775	519,436	326,626	1,125,334
		2015	79,923,711	955,579	536,792	504,675	1,522,283

NO	Nama Daerah	Tahun	PDRB	PAD	DAU	DAK	Belanja Modal
		2016	83,808,233	1,015,827	593,533	1,343,258	1,995,571
		2017	87,500,100	1,054,460	-	-	2,628,360
		2018	91,702,100	1,370,528	583,106	1,883,665	2,879,590
17	Kota Sibolga	2010	22,010,958	151,184	227,216	181,359	448,079
		2011	23,248,772	216,634	248,406	227,539	899,637
		2012	24,585,010	266,984	292,873	192,903	909,002
		2013	26,050,101	294,576	338,507	294,741	870,604
		2014	27,572,684	529,230	371,813	338,803	1,058,810
		2015	29,131,740	604,868	380,075	906,700	1,267,248
		2016	30,630,714	685,379	412,806	1,005,751	1,853,821
		2017	32,252,120	1,036,722	-	-	1,248,244
		2018	33,941,202	812,457	405,554	909,351	1,424,678
		18	Kota Tanjung Balai	2010	34,805,227	241,260	241,922
2011	36,899,026			270,891	275,525	201,980	920,057
2012	39,195,539			277,024	313,730	179,557	1,140,853
2013	41,523,941			319,208	369,247	283,910	1,088,003
2014	43,925,847			572,875	387,259	255,205	1,402,513
2015	46,372,139			570,942	398,406	295,265	1,067,231
2016	49,045,449			645,753	418,171	1,157,565	1,317,477
2017	51,755,515			651,083	-	-	1,249,506
2018	54,741,144			744,353	418,666	908,446	1,209,131
19	Kota Tebing Tinggi			2010	24,569,920	262,725	228,058
		2011	26,088,633	327,368	261,949	220,862	937,029
		2012	27,588,739	473,310	307,636	253,235	979,554
		2013	29,247,539	531,995	368,587	362,831	1,608,603
		2014	30,841,721	745,153	385,030	362,317	1,635,821
		2015	32,352,999	824,101	400,237	484,298	1,584,872
		2016	34,006,862	940,585	432,437	1,255,589	2,033,553
		2017	35,764,152	1,132,229	-	-	1,841,562
		2018	37,613,855	1,140,484	425,818	1,148,689	2,033,401
		20	Kota Padang Sidempuan	2010	26,341,235	146,024	270,129
2011	27,881,632			214,653	308,015	255,685	-
2012	29,527,177			236,223	364,923	239,866	987,588
2013	31,240,236			350,182	423,251	399,572	1,172,169
2014	32,873,867			550,268	470,353	383,293	1,040,009
2015	34,542,426			677,307	481,835	468,041	1,216,674
2016	36,368,724			784,178	507,686	1,380,850	1,595,089
2017	38,300,128			1,096,404	-	-	1,840,940
2018	40,391,271			750,636	498,222	1,246,833	1,130,721
21	Kab. Pakpak Bharat			2010	5,069,860	220,932	420,259
		2011	5,375,656	63,060	198,239	288,314	1,134,882
		2012	5,698,611	63,531	232,990	254,609	702,385
		2013	6,035,481	90,807	273,599	540,059	1,479,866
		2014	6,393,902	153,887	313,591	621,850	1,444,334
		2015	6,774,329	158,803	326,899	756,450	1,564,074
		2016	7,178,912	187,488	342,285	814,371	1,641,789
		2017	7,611,522	293,205	-	-	1,383,634
		2018	8,052,013	200,612	339,272	715,323	1,183,366

NO	Nama Daerah	Tahun	PDRB	PAD	DAU	DAK	Belanja Modal
22	Kab. Nias Selatan	2010	28,027,680	10,276	277,887	571,765	1,447,167
		2011	29,231,112	230,307	318,921	541,931	962,146
		2012	30,744,565	155,921	378,606	646,792	2,027,536
		2013	32,173,999	320,877	422,944	1,017,999	2,086,918
		2014	33,563,891	128,280	462,793	909,007	1,989,443
		2015	35,051,894	150,370	468,406	1,272,063	1,849,781
		2016	36,621,925	162,631	540,754	1,597,444	1,227,861
		2017	38,277,211	184,503	-	-	1,879,467
		2018	40,192,010	196,057	556,174	1,996,516	2,213,058
23	Kab. Humbang Hasundutan	2010	26,521,890	100,072	279,893	292,105	826,105
		2011	27,621,281	128,700	313,431	316,068	787,288
		2012	29,181,759	179,019	376,847	289,681	1,244,929
		2013	30,851,976	176,329	440,920	507,796	1,908,673
		2014	32,561,888	294,913	486,880	569,596	2,239,480
		2015	34,068,017	352,378	511,805	571,499	1,962,752
		2016	35,777,491	420,968	533,185	1,546,313	2,236,301
		2017	37,572,741	855,984	523,818	1,824,727	2,247,030
		2018	39,461,203	927,359	523,818	1,421,337	1,688,610
24	Kab. Serdang Bedagai	2010	120,494,587	220,932	420,259	613,088	1,165,085
		2011	127,800,611	358,944	458,160	657,504	1,241,317
		2012	135,588,461	392,746	554,245	647,049	1,487,126
		2013	143,457,582	503,717	628,900	682,307	2,506,217
		2014	150,803,813	747,624	698,413	695,650	1,834,386
		2015	158,419,457	801,419	720,552	1,083,856	1,989,778
		2016	166,561,654	1,080,628	774,458	2,592,406	2,911,182
		2017	175,167,452	1,037,113	-	-	2,386,049
		2018	184,211,122	1,943,830	763,943	3,109,842	3,491,043
25	Kab. Samosir	2010	18,877,221	118,132	243,042	389,697	825,484
		2011	19,855,701	142,016	282,988	356,238	1,196,960
		2012	21,056,483	174,596	331,413	278,446	854,237
		2013	22,340,882	266,613	384,761	335,475	1,624,397
		2014	23,671,027	368,496	441,619	467,010	1,677,579
		2015	25,037,789	342,975	447,471	597,839	1,816,118
		2016	26,357,676	392,682	459,550	1,137,060	2,352,342
		2017	27,771,277	722,287	-	-	2,242,409
		2018	29,322,123	474,466	453,737	1,398,835	1,862,818
26	Kab. Batu Bara	2010	161,210,448	206,167	337,663	428,320	1,398,063
		2011	169,464,596	132,409	385,883	292,016	1,384,799
		2012	179,163,559	165,582	452,227	441,486	1,687,424
		2013	186,746,225	277,620	517,734	421,786	2,052,033
		2014	194,583,329	452,181	591,720	518,190	2,100,183
		2015	202,648,181	515,141	578,875	639,801	2,279,670
		2016	211,272,282	593,883	613,237	2,212,047	3,204,240
		2017	220,341,203	669,448	602,464	1,558,542	1,644,200
		2018	229,992,210	643,853	602,464	1,513,581	1,399,775
27	Kab. Padang Lawas	2010	47,304,025	125,281	241,107	427,676	1,238,637
		2011	50,200,555	76,283	249,497	400,167	1,301,258
		2012	53,320,208	98,812	331,754	425,209	1,168,539

NO	Nama Daerah	Tahun	PDRB	PAD	DAU	DAK	Belanja Modal
		2013	56,596,181	231,401	371,650	310,829	1,372,976
		2014	59,973,140	287,798	408,044	347,239	1,032,103
		2015	63,415,293	347,074	427,773	717,110	2,267,094
		2016	67,259,830	393,414	525,047	1,502,830	2,188,591
		2017	71,101,235	465,097	-	-	2,219,637
		2018	75,364,252	474,553	521,563	1,574,640	2,044,580
28	Kab. Padang Lawas Utara	2010	48,651,420	53,328	243,970	304,433	863,120
		2011	51,996,490	87,284	262,539	447,592	1,614,650
		2012	55,314,876	127,981	348,056	367,332	2,329,181
		2013	58,715,144	158,042	387,955	363,111	1,934,258
		2014	62,283,480	221,727	418,727	364,615	1,719,515
		2015	65,985,994	264,461	444,806	456,565	1,706,400
		2016	69,916,622	304,532	542,200	1,528,395	2,284,404
		2017	73,794,158	745,249	-	-	3,125,712
		2018	77,911,427	743,061	537,456	1,382,168	1,960,362
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	2010	115,545,251	83,719	249,091	299,930	988,052
		2011	122,495,455	170,813	266,923	354,332	1,461,768
		2012	130,244,932	189,766	334,512	256,635	1,452,005
		2013	138,120,888	267,020	400,567	532,257	3,350,666
		2014	145,461,217	363,868	450,151	522,608	2,449,556
		2015	152,945,074	322,872	427,015	932,957	2,620,308
		2016	160,884,202	425,079	513,547	1,558,674	2,946,261
		2017	169,080,012	849,645	504,526	1,423,800	2,731,527
		2018	177,984,012	522,098	504,526	1,479,331	2,193,793
30	Kab. Labuhanbatu Utara	2010	105,676,562	106,573	296,810	295,656	938,284
		2011	112,622,582	105,183	346,685	333,446	1,410,221
		2012	119,784,357	189,711	400,602	424,951	2,500,934
		2013	127,290,357	256,513	457,715	484,333	2,924,358
		2014	134,145,266	323,985	503,054	464,871	2,136,744
		2015	141,093,692	344,999	531,602	764,827	2,174,380
		2016	148,439,944	422,961	592,813	1,859,962	2,562,570
		2017	156,022,012	526,901	588,022	2,266,967	2,045,631
		2018	164,137,860	570,107	588,022	2,351,155	2,230,376
31	Kab. Nias Utara	2010	14,516,738	23,216	108,563	387,849	305,665
		2011	15,497,318	66,552	231,765	399,768	944,929
		2012	16,459,259	70,089	267,283	364,052	1,073,846
		2013	17,502,463	88,571	294,072	563,827	1,843,562
		2014	18,532,849	69,105	355,355	739,511	1,415,491
		2015	19,541,217	169,239	359,842	1,373,391	2,190,433
		2016	20,439,129	238,526	410,932	1,343,224	2,337,391
		2017	21,342,555	201,072	-	-	2,516,759
		2018	22,284,627	503,955	413,339	1,382,227	1,920,927
32	Kab. Nias Barat	2010	7,777,653	10,574	63,068	275,920	315,403
		2011	8,239,369	28,643	193,616	478,601	1,165,511
		2012	8,779,339	54,608	227,861	637,546	1,062,138
		2013	9,232,851	72,237	251,632	421,681	1,610,680
		2014	9,737,571	102,981	279,675	493,847	1,533,299
		2015	10,249,259	144,928	382,494	-	1,864,998

NO	Nama Daerah	Tahun	PDRB	PAD	DAU	DAK	Belanja Modal
		2016	10,744,765	156,167	346,452	611,807	1,561,803
		2017	11,261,212	362,400	-	-	1,997,480
		2018	11,765,499	401,930	347,723	2,074,174	2,478,965
33	Kota Gunung Sitoli	2010	20,166,796	26,635	100,936	253,378	1,683,305
		2011	21,436,031	60,513	252	507,900	1,364,495
		2012	22,761,477	93,297	305,726	568,982	1,497,289
		2013	24,177,189	103,825	356,043	317,818	1,657,034
		2014	25,643,678	191,645	383,525	322,315	1,797,457
		2015	27,128,637	243,347	397,362	839,277	2,094,936
		2016	28,763,583	291,854	434,260	1,650,871	2,601,382
		2017	30,491,422	297,699	-	-	2,496,176
		2018	32,335,478	294,564	426,759	1,099,062	1,835,213

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rudi Indra Pratama
NIM : 51151069
Tempat/Tanggal Lahir : Bagan Baru, 19 Oktober 1996
Umur : 23 Tahun
IPK : 3,67
Jenis Kelamin : Laki-laki
Fakultas/Jurusan/Semester : FEBI/EKI/IX
Alamat : Jl. Panglima Denai No. 86 Medan
No HP : 0852-6092-0841
Alamat Email : rudypatatama793@gmail.com /
rudy_pratama29@yahoo.com

Latar Belakang Pendidikan

- SD/MI : MIS Teladan III Bagan Baru
- SMP/MTS : MTsS Teladan III Bagan Baru
- SMA/MA : MAN Kisaran
- Perguruan Tinggi : UIN Sumatera Utara

Nama Orang Tua

- AYAH : Daryadi
- IBU : Suryani Sinaga

Nama Dosen Pembimbing

- Pembimbing I : Dr. M. Ridwan, MA
- Pembimbing II : Muhammad Syahbudi, MA

Riwayat Organisasi

- Wakil Ketua Patroli Keamanan Sekolah MAN Kisaran (2014-2015)
- Anggota DEMAF (2016) dan HMJ EKI (2017) FEBI UIN SU
- Anggota Ikatan Pelajar Mahasiswa Batu Bara (2016)
- Wakil Humas Remaja Masjid Raya Miftahul Iman, Medan (2017-2019)